



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2019 - 2023



“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”

## *Kata Pengantar*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Perubahan Tahun 2022) dapat tersusun. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan arah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan visi yang akan dicapai melalui misi yang telah ditetapkan.

Renstra ini secara garis besar memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, target dan pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Revisi Renstra Sekretariat Daerah disusun dengan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta perubahannya.

Renstra Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang ditetapkan. Harapan kami semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja khususnya kepada publik dan pembangunan nasional pada umumnya.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palembang, 2022  
Pj. **SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. S.A. SUPRIONO**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.196406071990031007

# **DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	6
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	33
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	45
IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	55
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	55
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	58
VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .....	87
VIII. PENUTUP .....	91

## **DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1.1	Susunan Kepegawaian Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	14
Tabel T-C 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	29
Tabel T-C 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Setda Provinsi Sumatera Selatan .....	32
Tabel T-C 2.5	Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu dan Kelima .....	53
Tabel T-C 2.6	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan .....	56
Tabel T-C 2.7	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Provinsi Sumatera Selatan 2019 -2020 .....	59
Tabel T-C 2.7	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Provinsi Sumatera Selatan 2021 -2023 .....	75
Tabel T-C 2.8	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	88

## ***DAFTAR GRAFIK***

Halaman

Grafik 1.1	Grafik Jumlah Peraturan Daerah yang dapat Diakses Publik Tahun.....	20
Grafik 1.2	Grafik Perbandingan Jumlah Peraturan Daerah yang diakses oleh Publik Tahun 2019 dan Tahun 2020 .....	20
Grafik 1.3	Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang Tahun 2020.....	23
Grafik 1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 .....	26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

**P**erencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang bertujuan dari pembuat keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019–2023, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dalam penyusunannya, Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Selain itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancab domestik, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Perubahan Tahun 2022) adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya perubahan tatanan yang

menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Perubahan Tahun 2022) diharapkan dapat menjadi pedoman kebijakan dan perencanaan agar menjadi lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

#### **2. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

**S**ekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk mengatur tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
  1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
  2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- b. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang terdiri dari :
  1. Biro Perekonomian.
  2. Biro Administrasi Pembangunan.
  3. Biro Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi dan Umum yang terdiri dari :
  1. Biro Organisasi.
  2. Biro Umum dan Perlengkapan.
  3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Biro-Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaran tugas, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
  - b. penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
  - c. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
  - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota.

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;

- d. pelaksana koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, memberikan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  - e. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan.

Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan Perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan

- kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi Perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
  - c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Perangkat Daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan.
- Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
  - b. pengendalian pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
  - c. pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
  - d. pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
  - e. pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Biro Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam dalam penyiapan Perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan berkaitan dengan tugasnya.

7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, sumber daya manusia dan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, administrasi pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur.

Biro Organisasi mempunyai fungsi :

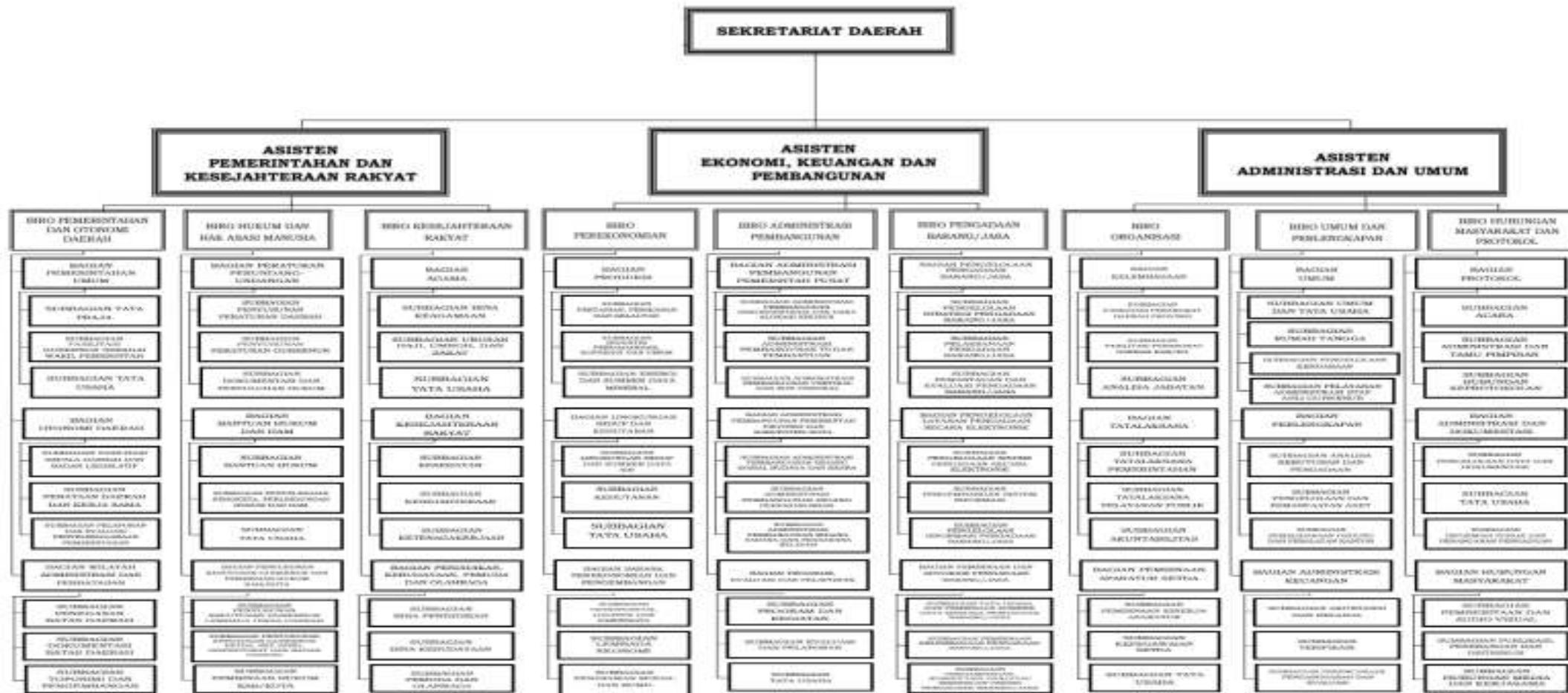
- a. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
- b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;

- c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, Pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
  - d. penyelenggaraan pembinaan teknis, administratif dan sumber daya Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur.
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya manusia di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah.
- Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rumusan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis kebijakan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu dan dan informasi publik;
- b. penyiapan bahan penyelenggaran pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat, protokolan pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokoan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## STRUKTUR ORGANISASI



## 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Manusia yang merupakan aparatur yang ada di Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1  
Susunan Kepegawaian Biro-Biro Sekretariat Daerah  
Provinsi Sumatera Selatan**

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	Kepala Biro	Pembina Tk. I (IV/b) = 1 Org	S3 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 3 Org	S2 = 1 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 3 Org
		Penata Muda Tk. I (III/c) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 2 Org
4.	Staf	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk.I (IV/a) = 1 Org	S2 = 2 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 5 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Penata (III/c) = 3 Org	S2 = 1 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 3 Org	S2 = 1 Org SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Penata Muda (III/a) = 2 Org	D3 = 1 Org SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Pengatur Tk.I (II/d) = 2 Org	SLTP = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Pengatur (II/c) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pengatur Muda Tk. I = 1 Org	SLTA = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Pengatur Muda = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	Kepala Biro	Pembina Utama muda = 1 Org (IV/c)	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pembina(IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata Tk. I (III.d) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk. I (III.d) = 6 Org	S2 = 3 Org S1 = 3 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 4 Org
		Penata (III/c) = 2 Org	S2 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Penata Tk.I (III/d) = 2 Org	S2 = 1 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org
		Penata (III/c) = 2 Org	S2 = 1 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 9 Org	S2 = 3 S1 = 4 Org SLTA = 2 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 6 Org
		Penata Muda (III/a) = 4 Org	S1 = 4 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 3 Org
		Pengatur (II/c) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Perempuan = 1 Org

3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT/GOL</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	Kepala Biro Plt	Pembina Utama Muda = 1 Org (IV/c)	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk I (IV/b) = 3 Org	S3 = 1 Org S2 = 2 Org	Laki-laki = 3 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 6 Org	S2 = 2 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 6 Org
		Penata (III/c) = 1 Org	S1 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	Perempuan = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 7 Org	S2 = 1 Org S1 = 6 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 4 Org
		Penata (III/c) = 8 Org	S2 = 2 Org S1 = 6 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 6 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 4 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org D3 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 3 Org
		Penata Muda (III/a) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pengatur Tk. I (II/d) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Muda (II/a) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 3 Org	S2 = 3 Org	Laki-laki = 3 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	Perempuan = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 5 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 4 Org
		Penata (III/c) = 1 Org	S1 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV.a) = 3 Org	S2 = 3 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 6 Org	S1 = 6 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 4 Org
		Penata (III/c) = 2 Org	S1 = 1 Org DIII = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 7 Org	S1 = 2 Org SLTA = 5 Org	Perempuan = 7 Org
		Penata Muda (III/a) = 1 Org	SLTA = 10rg	Perempuan = 1 Org
		Pengatur (II/d) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Perempuan = 1 Org

5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina (IV/a) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 3 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S2 = 2 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 3 Org
		Penata (III/c) = 1 Org	D3 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
4.	Staf	Penata Tk.I (III/d) = 3 Org	S1 = 3 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Penata (III/c) = 1 Org	S1 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Muda (III/a) = 2 Org	S1 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Pengatur Tk.I (II/c) = 1 Org	SLTP = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

6. Biro Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-Laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 1 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S2 = 3 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 3 Org
4.	Staf	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 3 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 10 Org	S2 = 4 Org S1 = 6 Org	Laki-laki = 7 Org Perempuan = 3 Org
		Penata (III/c) = 7 Org	S2 = 3 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 3 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 4 Org	S2 = 2 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Muda (III/a) = 1 Org	D III = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

7. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 3 Org	Perempuan = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 2 Org		Laki-laki = 2 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 5 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 2 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 3 Org	S2 = 3 Org	Perempuan = 3 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata (III/c) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Penata (III/a) = 2 Org	S1 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Pengatur Tk.I (II/d) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Perempuan = 1 Org

8. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 5 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 3 Org
		Penata (III/c) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 17 Org	S2 = 6 Org S1 = 11 Org	Laki-laki = 7 Org Perempuan = 10 Org
		Penata (III/c) = 12 Org	S2 = 2 Org S1 = 10 Org	Laki-laki = 6 Org Perempuan = 6 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 14 Org	S1 = 11 Org SLTA = 3 Org	Laki-laki = 10 Org Perempuan = 4 Org
		Penata Muda (III/a) = 13 Org	S1 = 9 Org D III = 3 Org SLTA = 1 Org	Laki-laki = 10 Org Perempuan = 3 Org
		Pengatur Tk. I (II/d) = 13 Org	SLTA = 13 Org	Laki-laki = 8 Org Perempuan = 5 Org
		Pengatur (II/c) = 6 Org	SLTA = 6 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 2 Org
		Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 2 Org	SLTA = 2 Org	Laki-laki = 2 Org
		Pengatur Muda (II/a) = 1Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
	Juru (I/c)	= 2 Org	SLTP = 2 Org	Laki-laki = 2 Org

9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan.

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 2 Org	S2 = 2 Org	Laki-laki = 2 Org
3.	Kepala Subbagian	Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S1 = 3 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata (III/c) = 3 Org	S2 = 1 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 3 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 3 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 3 Org
4.	Staf	Penata Tk.I (III/d) = 10 Org	S2 = 2 Org S1 = 7 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 5 Org
		Penata (III/c) = 12 Org	S2 = 2 Org S1 = 10 Org	Laki-laki = 7 Org Perempuan = 5 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 12 Org	S1 = 7 Org D3 = 2 Org SLTA = 3 Org	Laki-laki = 5 Org Perempuan = 7 Org
		Penata Muda (III/a) = 9 Org	S1 = 7 Org SLTA = 2 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 6 Org
		Pengatur Tk. I (II/d) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pengatur (II/c) = 3 Org	SLTA = 3 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Juru (I/c) = 1 Org	SLTP = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

Jadi disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa biro masih membutuhkan SDM yang mana SDM pada saat ini masih terdapat kekurangan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

#### **2.3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target**

Di bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra sebelumnya (2013-2018). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Dalam penetapan target selama 5 tahun terhitung dari tahun 2013 s.d 2018 terjadi perubahan target.

Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi perubahan terhadap target yang telah ditetapkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2014, perubahan target tersebut disebabkan adanya pertimbangan sumber daya yang dimiliki atau penyesuaian anggaran, perubahan target tertuang pada Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Pencapaian Indikator Kinerja dari tahun 2019 -2020 secara kuantitatif adalah sebagai berikut:

#### **1. Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

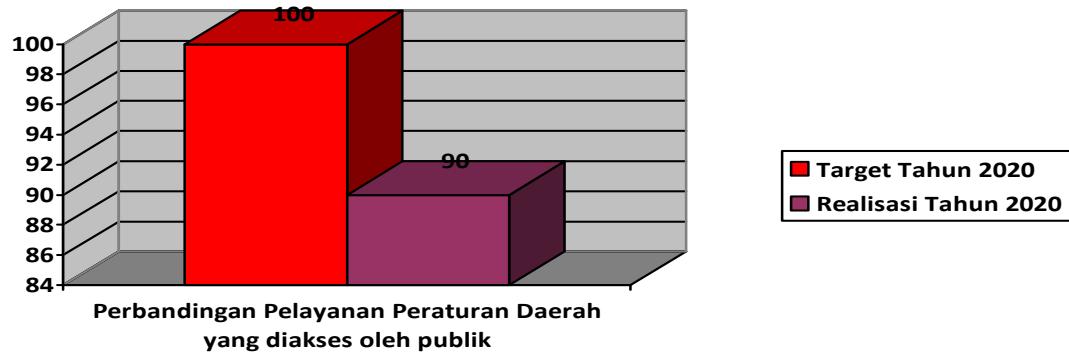
Penyampaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 ditargetkan dengan nilai Sangat Tinggi (**ST**) dengan angka **(3,0)**.

Untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 Ranking Nasional masih dalam proses penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

## **2. Capaian Produk Hukum Daerah penanganan Perkara dan HAM**

### **Jumlah Peraturan Daerah yang Diakses oleh Publik**

Target Peraturan Daerah pada tahun 2020 sebesar 100% (8 Peraturan Daerah) dan realisasinya adalah 90% (14 Peraturan Daerah) yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 90% dari target yang ditetapkan. Kesemua peraturan daerah dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website [www.jdih.sumselprov.go.id](http://www.jdih.sumselprov.go.id).

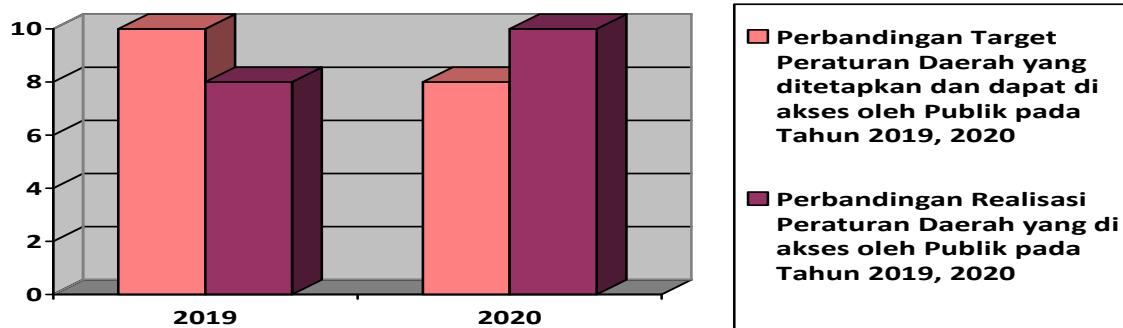


Grafik 1.1 Jumlah Peraturan Daerah yang diakses oleh Publik Tahun 2020

Peraturan Daerah terjadinya peningkatan penyusunan Perda karena ada banyaknya fasilitas penyusunan produk hukum.

### **Jumlah Peraturan Gubernur yang Diakses oleh Publik**

Peraturan Gubernur pada Tahun 2020 target 37 (tiga puluh tujuh) Pergub dan realisasinya adalah 64 (enam puluh empat) Pergub yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 173% dari target yang ditetapkan.



Grafik 1.2 Perbandingan Jumlah Peraturan Daerah yang diakses oleh Publik Tahun 2019 dan Tahun 2020

## **3. Capaian Indikator Kinerja Jumlah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/ BUMN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.**

Fasilitasi penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/ BUMN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30

MoU terealisasi sebanyak 35 MoU atau 116,67%, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan MoU berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai aspek didalam penandatanganan MoU.

### **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019 DAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020**



Jumlah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah tahun 2019 ditargetkan 20 MoU (100%) dan terealisasi 20 (dua puluh) MoU.

#### **4. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 mencapai nilai 60,50 dengan kategori “**B**”. Terdapat upaya peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- 1) Terus menerus melakukan evaluasi perkembangan penerapan kebijakan agen perubahan untuk memastikan terwujudnya perbaikan Tatakelola pemerintahan yang lebih baik. Evaluasi ini termasuk untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan agen perubahan yang tidak hanya bertugas mendorong perbaikan di unit kerjanya namun juga mempromosikan perubahan di lingkungan kepada masyarakat;
- 2) Menyelaraskan penyusunan kelembagaan Perangkat Daerah dengan RPJMD 2018 – 2023 untuk memastikan terwujudnya *perfomance based organization*;
- 3) Menyelaraskan indikator kinerja individu dengan kinerja organisasi serta menjadikan kinerja individu tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment* termasuk pembayaran tunjangan kinerja sebagai hak sebagai atas kinerja. Dengan pembayaran tunjangan kinerja ini diharapkan dapat menghapuskan penghasilan pegawai lainnya selain

gaji yang terkait dengan tugas fungsi (misalnya honorarium kegiatan dan sebagainya);

- 4) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam mendorong penerapan program-program Reformasi Birokrasi di organisasi sehingga mampu meningkatkan partisipasi pegawai;
  - 5) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan proses birokrasi baik dalam pelayanan, informasi publik dan administrasi organisasi, dengan perencanaan pengembangan penerapan teknologi informasi yang mampu meningkatkan integrasi dan akurasi data;
  - 6) Terus meningkatkan pengembangan kompetensi dan pola karir sumber daya manusia yang diterapkan secara konsisten sehingga mampu meningkatkan kompetensi pegawai yang hasilnya akan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja organisasi;
  - 7) Meningkatkan upaya peningkatan integritas pegawai mendorong setiap pimpinan unit pimpinan untuk kerja lebih “mengenali” seluruh anak buahnya beserta gaya hidupnya, serta diharapkan secara dini mampu mendeteksi jika terdapat penyimpangan integritas pegawai;
  - 8) Terus menerus melakukan reviu atas pelaksanaan proses bisnis dan Standar Operasi Prosedure (SOP);
  - 9) Untuk memastikan perbaikan kualitas pelayanan publik telah terwujud secara komprehensif. Hal terpenting dari pelaksanaan reviu ini selain perbaikan kualitas pelayanan itu sendiri, juga memperkuat kualitas pengendalian internalnya;
  - 10) Meningkatkan kapasitas Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga peran yang diharapkan tidak hanya berfungsi *over sight body* semata, tetapi juga harus mampu memberikan *insight* kepada seluruh Perangkat Daerah. Inspektorat diharapkan dapat memberikan pendapat dan masukan mengenai program-program, kebijakan dan operasi yang kinerja baik, menyarankan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan, menyarankan upaya Perangkat Daerah dalam meningkatkan hubungan lintas Perangkat Daerah yang lebih baik. Fungsi ini dilakukan dengan mendalami pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah serta reviu kinerja berkelanjutan.
- Di perlukan peran dan keterlibatan pimpinan dalam mendorong pegawai untuk berpatisipasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## **5. Capaian Indikator Kinerja jumlah pilar batas Daerah yang terpasang**



Pada Tahun 2020 jumlah pilar batas daerah yang terpasang ditargetkan 60 pilar dan hanya direalisasikan 10 pilar (16,67%) tidak mencapai batas capaian kinerja ditentukan, hal ini disebabkan pemasangan pilar batas antar Provinsi harus di fasilitasi Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Pusat (Kementerian Dalam Negeri RI), tahun 2020 Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) pusat tidak bisa memfasilitasi terkait anggaran yang sesuaikan karena kebijakan Covid-19.

## **6. Capaian indikator kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di Fasilitasi**

Persentase kegiatan Bidang Kesejahteraan rakyat yang difasilitasi tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% yang terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan yang menunjang indikator ini. Adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan

1. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi.
2. Pemberangkatan Kafilah MTQ/STQ ke Tingkat Nasional.

## **7. Capaian indikator Kinerja Persentase Informasi Bidang Perekonomian yang dapat di Akses Publik**

Capaian Indikator jumlah informasi bidang perekonomian yang dapat diakses publik persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100% hal ini disebabkan adanya dukungan data informasi dari berbagai aspek yang telah disediakan untuk menunjang kegiatan terlaksana dengan baik. Data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia antara lain:

1. Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (100%).
2. Identifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Wilayah Sumatera Selatan (100%).

3. Identifikasi Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Wilayah Sumatera Selatan (100%).
4. Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan (100%).
5. Promosi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Negeri (100%).

Dari keseluruhan data informasi yang disajikan hampir semua capaian kinerja terserap 100% dengan program perekonomian dan pembangunan yang mengarah pada 2 pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yaitu fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro yang berorientasi kepada persentase data informasi pembangunan yang tersedia.

## **8. Capaian indikator Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)**



Kesemua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>.

Ada tahun 2020 persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 110,20% atau dari 500 kegiatan terealisasi mencapai 551 kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka yang telah ditentukan diatas 100% hal ini disebabkan meningkatnya anggaran tahun 2020.

Target pengadaan yang terdaftar atau melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tahun 2019 adalah 500 (Lima ratus) kegiatan dan realisasinya 460 Kegiatan (Empat ratus enam puluh), jumlah tersebut mencapai angka 92,00% dari target yang ditetapkan, pada tahun 2019 tidak mencapai target yang akan dicapai dikarenakan anggaran pada tahun 2019 tidak terlalu besar dan sistem pemaketan sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan 18,20% dikarenakan adanya meningkatnya anggaran dan sistem pemaketan yang ditunjang.

## **9. Capaian indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

Capaian nilai SAKIP Komponen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

No.	Tahun	Nilai Angka	Kategori	Interpretasi
1.	2016	76,19	BB	Sangat Baik
2.	2017	80,01	A	Memuaskan
3.	2018	78,71	BB	Memuaskan
4.	2019	78,84	BB	Memuaskan
5.	2020	78,98	BB	Memuaskan

Capaian indikator Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 s.d 2020, hal ini tergambar bahwa nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan dengan akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem manajemen yang andal, menggunakan *knowledge management* untuk membangun budaya berkinerja, dan banyaknya inovasi, terjadinya peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 dikarenakan :

1. Adanya Keselarasan kinerja Perangkat Daerah.
2. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Anggaran termanfaatkan secara efektif dan efisien serta capaian reformasi birokrasi.
4. Inefisiensi anggaran dapat dicegah
5. Keberhasilan pembinaan kepada Kabupaten/Kota.
6. Adanya kerjasama antara BAPPEDA (Sebagai Nilai Perencanaan), Inspektorat (Sebagai Nilai Pengawasan) dan Biro Organisasi.

Pada tahun 2018 nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan, hal ini terjadi karena tingkat pemahaman Kepala Perangkat Daerah terhadap pentingnya SAKIP. Perlu adanya perbaikan kedepan serta perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya SAKIP. Adapun penyebab penurunan nilai SAKIP yaitu kurang memahami tugas dan fungsi dalam organisasi yang dipimpin dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP kedepan yaitu :

1. Melakukan Bimbingan Teknis kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Pembinaan kepada Kabupaten/Kota.

3. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengembang SAKIP.
4. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.

## 10. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat



Grafik 1.4 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 telah menargetkan nilai indeks kinerja PD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata “Baik” (62,51 – 81,25), untuk itu Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 dengan mendapatkan nilai rata-rata “Sangat Baik” (83,60). Berdasarkan nilai hasil survei dimaksud Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi angka minimal untuk nilai rata-rata “Sangat Baik” yaitu 81,26 dimana nilai rata-rata yang diperoleh 83,60.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 yaitu 80,95 kategori “B” sudah melebihi kategori yang telah ditentukan dari indeks kumulatif dilingkungan Sekretariat Daerah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 83,60 kategori “A”, hal ini disebabkan adanya kerjasama pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, dan proses pengumpulan data sesuai tenggang waktu yang dijadwalkan.

Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan dengan sampel 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah;
2. Biro Hukum dan Ham;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. Biro Perekonominan;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Biro Organisasi;
8. Biro Umum dan Perlengkapan;
9. Biro Humas dan Protokol.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan dan meng-update standar pelayanan publik.
2. Melakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, OMBUDSMAN RI dan Akademisi untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Diterapkan Survey Kepuasan Masyarakat berbasis elektronik disetiap unit pelayanan publik yang menangani pelayanan langsung kepada masyarakat.

#### **11. Capaian Jumlah PD yang telah Memiliki Struktur Organisasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**

Persentase PD yang telah memiliki struktur organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2020 ditargetkan 100%, dan terealisasi 100%.

#### **12. Capaian Jumlah Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja**

Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada tahun 2020 sebesar 60% dan terealisasi sebesar 100%. Terdapat 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah, 9 (sembilan) Biro, 3 Asisten dan 3 (tiga) staf ahli yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerjanya.

#### **13. Capaian indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal**

Capaian persentase fasilitasi sarana dan prasarana yang optimal pada tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi hanya 100%. Capaian indikator kinerja tahun 2020 pada Sekretariat Daerah telah terselenggara dengan baik tugas pokok dan fungsi dari Biro dengan baik dan lancar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Program pada Tahun 2020 yang dilaksanakan untuk mewujudkan indikator ini adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Capaian Kinerja Keuangan dari segi Anggaran dan Realisasi trendnya semakin meningkat dari tahun ke tahun yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%.

Dari target RPJMD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018, telah dilaksanakan program/kegiatan prioritas yang didanai APBD Provinsi Sumatera Selatan. Rata – rata rasio pencapaian pertahun adalah 1, artinya pencapaian indikator kinerja telah 100%, walaupun ada beberapa rasio yang turun, tapi dapat tertutupi dengan pencapaian tahun berikutnya yang over target, Secara keseluruhan, sudah menggambarkan hasil yang optimal. Secara keseluruhan target RPJMD dari tahun 2013 – 2018, secara kumulatif realisasi sudah mencapai 100%.

Pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat secara langsung dihitung dengan membandingkan dengan indikator makro pembangunan Sumatera selatan, karena hasil-hasil Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan langkah awal sebelum memasuki perencanaan pembangunan. Penilaian final menyangkut indikator makro baru dapat dilakukan apabila hasil-hasil yang berupa rekomendasi sebagai bahan kebijakan sudah diaplikasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat di akses oleh publik	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		ST(Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	2,8	2,9	3,0	3,0	0
		Penyampaian LKPJ dan RLPPD Pemerintah Prov. Sumsel yang tepat waktu		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	-	-	-	3 Dok LKPJ dan 10 buku	3 Dok LKPJ dan 10 buku
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pelayanan Kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	100%	100%	100%	100%	100%
2		Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.		35 MoU	40 MoU	45 MoU	55 MoU	65 MoU	25 MoU	35 MoU	40 MoU	25 MoU	35 MoU	14 Mou	16 Mou	18 Mou	46%	53%	

3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik	- Jumlah Peraturan yang dapat diakses oleh publik		10 Perda	10 Perda	11 Perda	10 Pergub	13 Pergub	22 Perda	11 Perda	18 Perda	8 Perda	220%	110%	163,54%	80%	61,54%	
			- Jumlah Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik		30 Pergub	32 Pergub	37 pergub	35 Pergub	13 Pergub	22 Pergub	11 Pergub	18 Pergub	32 Pergub	8 Pergub	220%	110%	163,67%	120%	61,54%
			- Jumlah perkara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selesai		30 Perkara	4 Perkara	5 Perkara	7 Perkara	8 Perkara	14 Perkara	25 Perkara	41 Perkara	9 Perkara	8 Perkara	420%	160%	820%	78%	100%
4	Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di		Jumlah Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah	- Jumlah dokumen kebijakan pembinaan koperasi dan UMKM, Pertanian dan Sumber Daya Alam serta TPID																
			- Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kebijakan pembinaan LHK, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan																
			- jumlah BUMD yang dibina dan dievaluasi																
			- jumlah dokumen informasi investasi daerah																
6	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Capaian Target Kegiatan APBD/APBN OPD Provinsi.	Jumlah realisasi Kegiatan APBD/APBN	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Persentase Laporan yang dikelola	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan	Sistem Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Komponen Pelaporan	Jumlah Dokumen LKjIP Provinsi Sumatera Selatan		80	82	84	84	84	80,01	78,71	78,84	78,98	-	85%	100%	85%	85%	-
	Persentase Penetapan Peraturan per Undang-Undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku				!00%	100%	100%	100%	100%	!00%	100%	100%	100%	100%	!00%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase PD yang telah menyusun anjab ABK	Jumlah PD yang telah membuat Anjab ABK			80%	80%	80%	85%	85%	80%	100%	100%	100%	100%	!00%	100%	100%	100%	100%	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Sumsel yang				!00%	100%	100%	100%	100%	!00%	100%	100%	100%	100%	!00%	100%	100%	100%	100%	

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2) 2016	(3) 2017	(4) 2018	(5) 2019	(6) 2020	(7) 2016	(8) 2017	(9) 2018	(10) 2019	(11) 2020	(12) 2016	(13) 2017	(14) 2018	(15) 2019	(16) 2020	(18)	(19)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	502.622.800	869.305.015	1.022.035.019	54.514.830.357	57.593.530.165	502.622.800	869.305.015	1.022.035.019	47.379.231.495	49.236.134.818	100%	100%	100%	86,91	85,49	100%	59,620,421,292,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	250.000.000,-	0	50.151.898.250	88.281.989.940	0	0	0	33.531.470.118	79.058.045.781	0%	0%	0%	66,86	89,55	0%	49,343,079,274
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah	178.043.600	30.000.000	150.000.000	320.000.000	191.875.000	175.043.600	28.679.425	127.979.900	310.776.334	187.987.455	71,88	23,59	85,32	97,12	97,97	16,18	680.076,750
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1.886.409.420	1.100.000.000	2.008.131.000	970.000.000	1.229.040.400	1.856.309.420	1.028.368.230	1.662.091.998	906.845.187	1.216.247.780	88,11	15,11	82,77	93,49	98,96	33,24	5.696.864.391
Program Penataan Daerah Otonom Baru	489.577.00	2.359.000.000	2.750.000.000	1.518.516.000	767.528.627	47.957.700	2.320.988.285	2.646.944.377	1.490.063.867	758.819.811	88,11	11,22	96,25	98,13	98,87	98,76	6.657.718,191
Program Kerjasama Wilayah Perbatasan	202.914.280	250.000.000	525.000.000	295.000.000	283.625.000	202.614.280	248.524.700	478.685.333	277.491.167	280.842.131	23,59	19,14	91,18	94,06	99,02	81,13	1.263.483,906
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.263.100.000	1.278.255.000	1.450.400.000	1.815.815.400	1.652.262.500	1.236.426.898	1.178.858.367	1.307.287.682	1.343.160.275	1.171.054.241	97,8 %	92,2 %	90,1 %	73,97	70,88	0%	5.299.944,070
Program Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan	3.136.055.000	2.016.365.500	2.900.501.000	689.435.000	13.003.400.000	3.043.293.050	1.771.289.999	2.191.129.063	2.899.972.750	16.858.842.600	97%	88%	82%	420,63	129,65	445.034.500	13.277.453,382
Program Pembangunan Bidang Ekonomi	-	1.067.430.000		480.000.000	1.033.661.700	1.103.622.314	553.923.347	828.833.481	480.000.000	1.033.661.700	0,98	0,77	0,96	100,00	100,00	945.346.013	3.173.111,482

\*) diisiikan dengan nama Perangkat Daerah

\*\*) diisiikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

\*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Tujuan utama pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus menggunakan data yang akurat dan terkini sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan Penelitian dan Pengembangan Daerah dihadapkan dengan ditemukan beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan secara proposional dalam perumusan kebijakan umum meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perumusan dan penyelenggaran kebijakan strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan;
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama daerah dan luar negeri;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang pertumbuhan perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan strategis;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan akuntabel dan berkeadilan;
7. Mengembangkan ekonomi kreatif dan membina BUMD;
8. Mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama;
9. Menata Produk hukum daerah;
10. Meningkatkan budaya taat hukum;
11. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang baik kebutuhan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

**D**engan memperhatikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan belum optimal (karena SDM yang membidangnya sering berubah).
2. Pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan dengan baik dikarenakan Perangkat Daerah belum mengetahui /memahami arti kerjasama daerah.
3. Sulitnya mencari kesepakatan mengenai batas daerah antara Kabupaten/Kota dikarenakan adanya potensi sosial ekonomi di daerah perbatasan.
4. Belum terlaksananya pembangunan di kelurahan yang sesuai dengan Kemendagri RI Nomor 130 Tahun 2018 sehingga pelaksanaan pembangunan di kelurahan belum optimal.
5. Belum optimalnya penyebaran informasi produk Hukum pada jaringan anggota.
6. Tenaga penyusun perancangan peraturan perundang-undangan belum tersedia di Perangkat Daerah.
7. Belum optimalnya cara penulisan pembakuan Rapergub di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Belum Optimalnya draf Raperda/Perda/Kabupaten/Kota untuk diklarifikasi/evaluasi.
9. Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Hukum belum ada.
10. Kurangnya pemahaman yang sama tentang kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat.
11. Rendahnya perumusan kebijakan bidang Kesra.
12. Masih kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan mengenai Tahfidz Al-Qur'an dan seni baca tulis huruf Al-Qur'an.
13. Belum optimalnya dukungan terhadap peran Lembaga Pendidikan Tilawatil Al-Qur'an (LPTQ) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

14. Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
15. Belum optimalnya dukungan dan peran Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
16. Belum optimalnya Monitoring dan Pelaporan Bidang Ekonomi.
17. Belum maksimalnya Evaluasi Data Program Bidang Ekonomi.
18. Koordinasi PD masih belum maksimal dalam mensinergikan kebijakan Nasional dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
19. Belum Optimalnya Koordinasi Tim Percepatan Pengembangan Perekonomian Daerah (TFPED), dalam memberikan pandangan dan saran, masukan dan kritik secara objektif secara rasional atas persoalan Pengembangan Ekonomi daerah.
20. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengacu pada perencanaan dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran, sehingga seringkali terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tidak berhasil guna dan berdaya guna maksimal.
21. Adanya perbedaan laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik pada beberapa Perangkat Daerah dan Satker antara laporan yang disampaikan ke Biro Administrasi Pembangunan, Bappeda dan BPKAD.
22. Rendahnya kemampuan ASN dalam penyusunan perencanaan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kemampuan ASN dalam menyusun indikator kinerja yang tepat, sehingga menyulitkan dalam proses pelaporan dan monitoring serta evaluasi organisasi.
23. Koordinasi dan pelayanan administrasi dengan Dinas dan Instansi masih kurang optimal.
24. Terbatasnya Jabatan Fungsional (Jabfung) pengadaan barang dan jasa.
25. Kelengkapan dokumen-dokumen Reformasi Birokrasi belum tersusun. dan belum terbentuk Tim Penilaian Angka Kredit Jafung pengadaan barang dan jasa.
26. Masih kurangnya kontribusi BUMD terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan.
27. Hasil kegiatan masih berorientasi pada output dan belum memperhatikan hasil dan dampaknya terhadap masyarakat.

28. Kelengkapan *Database* capaian indikator Standar Pelayanan Minimal belum optimal.
29. Belum dilakukan kerja sama pelaksanaan survei *external* pelayanan publik (SKM) dengan melibatkan lembaga lain seperti Ombudsman pewakilan, Perguruan Tinggi dan LSM.
30. Pemahaman untuk memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum dilaksanakan secara optimal.
31. Koordinasi data-data kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal.
32. Pemenuhan dokumen-dokumen pelayanan publik belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
33. Monitoring dan Evaluasi belum menjadi kebutuhan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kinerja, hal ini dapat dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan lainnya yang masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi saja.
34. untuk pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tindak lanjut dalam perbaikan kualitas unit pelayanan publik belum optimal.
35. Lemahnya implementasi data indeks hidup layak dan produktivitas di lapangan.
36. Lemahnya implementasi indeks KHL di lapangan.
37. Masih kurangnya pendanaan pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri di Sumatera Selatan
38. Lemahnya Koordinasi antar Sektor terkait Hubungan Kerjasama
39. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap Peraturan Perundangan di bidang Perangkat Daerah belum optimal.
40. Koordinasi dengan analis Perangkat Daerah belum maksimal.
41. Perangkat Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang belum optimal.
42. Pemahaman mengenai RKA pada internal Perangkat Daerah belum optimal.
43. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengamanan informasi strategis.
44. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Administrasi dan Birokrasi yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
45. Susahnya koordinasi ketika ada kunjungan Pejabat Negara

46. Belum adanya pembagian tugas yang jelas pada ruang tamu pimpinan, Griya Agung, *VIP Room* Bandara SMB II Palembang.
47. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan ada yang tidak sesuai dengan rencana/RAB yang telah dibuat pada ruang tamu pimpinan, Griya Agung, *VIP Room* Bandara SMB II Palembang.
48. Penyerahan agenda yang terlalu singkat sehingga persiapan.
49. Banyaknya barang dan aset yang sudah berusia, sehingga tidak ekonomis lagi.
50. Banyaknya kendaraan yang telah berusia sehingga tidak ekonomis lagi.
51. Kekurangan kendaraan di pool sehingga untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sehingga diharuskan untuk menyewa kendaraan di luar.
52. Kualitas aparatur keuangan yang masih kurang.
53. Tanggung jawab kerja & disiplin aparatur keuangan yang masih kurang.
54. Kurangnya SDM keuangan yang berkualitas.
55. Permohonan mengenai penatausahaan keuangan pada internal Perangkat Daerah belum optimal.
56. Pemahaman mengenai Renja pada internal Perangkat Daerah belum optimal.
57. Pemahaman mengenai RKA pada internal Perangkat Daerah belum optimal.
58. Pemahaman mengenai DPA belum optimal.
59. Kelengkapan dokumen-dokumen Reformasi Birokrasi belum tersusun dan Tim Pokja belum terbentuk.
60. Pemenuhan dokumen-dokumen pelayanan publik belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
61. Pemahaman mengenai DPA belum optimal Keterlambatan Transformasi data melalui media Internet.
62. Sulitnya menentukan kualifikasi perusahaan pers, lemahnya koordinasi antar berbagai sektor terkait pemutahiran data media.
63. Sulitnya menghitung volume pelaksanaan kegiatan dan sering berubahnya acara dalam pelayanan tamu pimpinan.
64. Kurangnya koordinasi antar PD dalam mendistribusikan barang-barang media cetak humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **A. Visi dan Misi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2019-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: **SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA** Penjelasan Visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut: Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan *pro-gender* yang transparan dan akuntabel. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumsel Maju Untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Berdasarkan Visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Misi 1** : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

**Misi 2** : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

**Misi 3** : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

**Misi 4** : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah

**Misi 5** : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang, bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses Tatakelola Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan turut bertanggungjawab dalam mewujudkan Kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa Perangkat Daerah yang mendukung terealisasinya misi ketiga, yaitu meningkatkan Tatakelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Peningkatan Tatakelola pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif memiliki tolok ukur indeks Reformasi Birokrasi, yang mana sasarannya adalah Tatakelola pemerintahan yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa

pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas kinerja penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan penting dalam pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

**Misi 1 :** Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

**Pada Misi Ketiga :** Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

**Misi Kelima :** Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Dari uraian diatas dapat ditelaah beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, antara lain :

- 1) Keterbatasan data dan Pembuatan Laporan.
- 2) Belum memadainya jumlah SDM serta kompetensi.
- 3) Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang maupun fungsi tambahan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Visi Sumsel Maju untuk semua. Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, hal ini harus di dukung oleh Komitmen Pimpinan yang membantu kelancaran dalam melakukan perubahan.

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik.
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan.
3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan.
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur.
5. Peningkatan Akuntabilitas.
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi.
7. Pengendalian Pembangunan.
8. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.
9. Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD.
10. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi.

Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dari Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

**a. Faktor Penghambat:**

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang masih terbatas. Masalah ini sangat *crusial*, karena SDM yang ada sangat kurang untuk menunjang kegiatan dalam pembuatan laporan dan kebijakan untuk mewujudkan Misi Ketiga, masih banyak staf yang latar pendidikannya tidak sesuai tupoksi, ditambah lagi dengan banyaknya SDM yang mendekati masa pensiun, tetapi tidak ada formasi untuk pengangkatan CPNS baru.
- 2) Belum maksimalnya dalam penyusunan SOP Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Motivasi dan minat (SDM) untuk berkerja sedikit.
- 4) Sinergi ABG (Akademisi, Bisnis dan *Goverment*).
- 5) Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing Biro yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program.
- 6) Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil orientasi hasil dengan kata lain belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah.

## **b. Faktor Pendorong**

- 1) Tupoksi Sekretariat Daerah sebagai lembaga resmi Pemerintah Daerah yang mempunyai tupoksi Pembuat kebijakan, yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
- 2) Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Adanya Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Selatan melalui Agenda Riset Daerah (ARD) tahun 2019-2023 yang memberikan masukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun kegiatan maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan atau Kepala Daerah.
- 4) Masukan ide/gagasan dari Staf Tenaga Ahli Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan kebijakan – kebijakan strategis daerah.
- 5) Terbentuknya kerjasama jaringan pada Perangkat Daerah untuk membantu terwujudnya kebijakan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan misi yang diembannya maka tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kerja untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- 2) Terwujudnya peningkatan daya guna hasil-hasil kinerja sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.
- 3) Terwujudnya peningkatan aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi :

- 1) Menata sistem penentuan arah kebijakan dan rencana aksi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan prioritas secara lebih selektif.
- 2) Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil-hasil Kinerja.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 memuat peruntukan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemukakan pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

#### **3.4.2 Kebijakan Umum Penataan Ruang**

Adapun tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi berfungsi sebagai :

- 1) dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
- 2) dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah provinsi
- 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW provinsi.
- 4) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
  - a) tujuan penataan ruang wilayah Provinsi.
  - b) karakteristik wilayah Provinsi.
  - c) kapasitas sumber daya wilayah Provinsi dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
  - d) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah bersangkutan.
- b. jelas, realistik, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu penelitian pada wilayah provinsi bersangkutan.
- c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **3.4.2.1 Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dasar penyusunan kebijakan di atas, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi dilakukan dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang agar penataan ruang wilayah Provinsi dapat tercapai.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- 1) Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan.
- 2) Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendalian dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi.
- 3) Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

### **3.4.2.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah**

Rencana struktur ruang wilayah Provinsi disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi meliputi :

- a) Rencana sistem jaringan transportasi;
- b) Rencana sistem energi dan kelistrikan;
- c) Rencana sistem telekomunikasi;
- d) Rencana sistem sumber daya air;
- e) Rencana sistem jaringan lainnya.

### **3.4.3 Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan sudah mengacu pada KLHS. Memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu-isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah serta pelayanan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mempunya mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana;
- f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan

di dalam menyusun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme tugas dan fungsi pada bagian masing-masing biro masih terkadang rancu dan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah sehingga terkadang tidak sinkron dengan peraturan daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan dalam mewujudkan Pemerintahan, terutama di dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran yang diinginkan 5 (lima) tahun ke depan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Sekretariat Daerah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan harapan di atas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan kepemerintahan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme dalam menentukan arah kebijakan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme dalam berkerja.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses dalam berkerja.
5. Meningkatnya kualitas SDM terhadap penguasaan keahlian (*skill*) yang sesuai tugas pokok dan fungsi pada pemangku jabatan.

### **3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis**

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

### **3.5.1.1. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil analisa lingkungan internal di dapat Kekuatan yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Memiliki SDM Fungsional dan Struktural.
2. Memiliki sarana prasarana yang mendukung dalam melakukan perkerjaan.
3. Telah ada kerjasama atau kemitraan (limit, K/L, BUMD dll).
4. Tersedia media publikasi (*Web, Facebook, E-Jurnal*).
5. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat.
6. Memiliki SOP.

Dari hasil analisa lingkungan internal didapat kelemahan yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas SDM.
2. Belum ada tim internal pengendali mutu kinerja.
3. Koordinasi program/kegiatan lintas PD maupun internal belum optimal.
4. Publikasi hasil kinerja Setda belum optimal.
5. Manajemen *database* kepegawaian belum optimal.

### **3.5.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil analisa lingkungan eksternal di dapat peluang yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam menentukan kebijakan.
2. Adanya Reward bagi ASN yang berkinerja.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil analisa lingkungan eksternal di dapat tantangan yang dihadapi, yaitu antara lain :

1. Budaya ego-sektoral relatif masih tinggi.
2. *Mindset* Inovatif belum merata.
3. Pelayanan publik harus cepat dan memuaskan.
4. Dinamika kemajuan teknologi yang semakin cepat serta perubahan iklim global yang ekstrim.

### **3.5.1.3 Analisis Strategi dan Pilihan**

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **a. Kekuatan-Peluang (S-O)**

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas Kinerja.
2. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Sekretariat Daerah cukup strategis.

#### **b. Kekuatan-Ancaman (S-T)**

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi Masyarakat.
2. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
3. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

#### **c. Kelemahan-Peluang (W-O)**

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas data melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi.
4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **d. Kelemahan-Ancaman (W-T)**

1. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dana aspirasi masyarakat.
2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk hukum dan kebijakan-kebijakan daerah.

4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

#### **3.5.1.4 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan**

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi, dan misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode *profesional judgement* maka terdapat 15 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas kinerja
3. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Sekretariat yang cukup strategis.
4. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi hasil kinerja yang optimal
5. Mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah sebagai pembuat kebijakan sebagai pedoman dalam penentu keputusan.
6. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
7. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.
8. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
9. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
10. Meningkatkan kelengkapan Tatalaksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Menyediakan Tatalaksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

12. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk- produk hukum.
13. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.
14. Mengoptimalkan penataan ketatalaksanaan.
15. Meningkatkan penguatan akuntabilitas.

### **3.5.2. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan**

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

- FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan kerjasama antar Perangkat Daerah.
- FPK III Meningkatkan kualitas kinerja dalam menentukan hasil kedepan (*Outcome*).
- FPKIV Menyediakan Tatalaksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

### **3.5.3. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Dalam menentukan isu isu strategis, ada beberapa faktor yang ditinjau, yaitu apakah isu tersebut mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, apakah merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah, memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, kemungkinan mudah untuk ditangani, dan merupakan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas Tatakelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketataklasanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
7. Optimaliasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
9. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;

10. Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
11. Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
12. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
13. Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
14. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
15. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;
16. Kurang memandaikan sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

**H**ubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang setelah revisi.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program biro-biro.

**Tabel T-C.25**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)
		2.1	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.1.1 Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	100%	100%	100%	100%
		3.1	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	3.1.1 Nilai SAKIP (Skor) ( Komponen Pelaporan)	A (81-82) 11%	A (82-83) 11%	A (83-85) 12%	A (84-85) 12%
				3.1.2 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	100%	100%	100%	100%
				3.1.3 Indeks Reformasi Birokrasi	BB (74)	BB (74)	BB (74)	A (84)
		4.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	4.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	B (62,51)	B (62,51)	B (62,51)	A (81,26)
		5.1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	5.1.1 Persentase Penyerapan Fisik Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Sesuai Rencana dan Target	100%	100%	100%	100%
		6.1	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	6.1.1 Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	100%	100%	100%	100%
				6.1.2 Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100%	100%	100%	100%
		7.1	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	7.1.1 Jumlah Pemekaran Kecamatan yang Difasilitasi	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan
				7.1.2 Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang	60 Pilar	60 Pilar	60 Pilar	60 Pilar
				7.1.3 Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/ Swasta/BUMN/ BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	20 Dokumen MoU	30 Dokumen MoU	35 Dokumen MoU	40 Dokumen MoU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				5	6	7	8	9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8.1 Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	8.1.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	100%	100%	100%	100%
			8.1.2	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	100%	100%	100%	100%
		9.1 Meningkatkan Efektifitas Tatakelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	9.1.1	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang efektif	100%	100%	100%	100%
		9.2 Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	9.2.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	-	20 Besar	-	15 Besar
			9.2.2	Meningkatnya Peringkat STQ	20 Besar	-	15 Besar	-
		10.1 Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang baik	10.1.1	Persentase PD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%
			10.1.2	Persentase PD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	50%	60%	70%	80%
			10.1.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi Sumsel.	100%	100%	100%	100%
			10.1.4	Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	87%	97%	97%	97%
			10.1.5	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**S**trategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bagaimana cara Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel berikut:

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA</b>			
<b>MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif berbasis Inovasi Daerah	1. Maju Ekonomi Kerakyatan 2. Maju Investasi, Industri dan Perdagangan 3. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan	1. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan 2. Peningkatan Investasi, Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan melalui Peningkatan (Biro Ekonomi)
<b>MISI III : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Terfasilitasinya kunjungan kerja lembaga legislatif ke Provinsi Sumatera Selatan	Kunjungan Kerja lembaga legislatif ke Provinsi Sumatera Selatan.	Mengadakan rapat persiapan dengan Biro Umum & Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol atas kunker lembaga legislatif serta Perangkat Daerah yang menjadi locus kunjungan.
	Terlaksana Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pemekaran kecamatan	Pembinaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Melakukan Pembinaan Daerah Otonomi Baru (DOB) bersama kemendagri RI dan memfasilitasi pemekaran kecamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang bebas KKN, Transparan dan Akuntabel	1. Sasaran 1.1 Terfasilitasi penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan hukum Pemprov.  2. Sasaran 1.2 Terlaksananya Evaluasi/ Fasilitasi/Klarifikasi Produk Hukum Kab./Kota  3. Sasaran 1.3 Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma	1. Strategi 1.1 Ditetapkannya Keputusan KDH sesuai usulan  2. Strategi 1.2 Terselesaiya Perkara yang menyangkut kepentingan hukum  3. Strategi 1.3 Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang di evaluasi /fasilitasi/clarifikasi	1. Arahan Kebijakan 1.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima, Bersih , Bebas KKN  2. Arahan Kebijakan 1.2 Sumatera Selatan Maju untuk Semua
	Maju Pelayanan Publik (Meningkatnya pelayanan publik berkualitas)	Meningkatkan Efektifitas Tatakelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima, Bersih, Bebas KKN</li> <li>- Meningkatkan Efektifitas Tatakelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Meningkatkan Bahan Kebijakan Pembinaan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan</li> <li>- Meningkatkan Bahan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</li> <li>- Meningkatkan Bahan Kebijakan Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan</li> </ul>
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat di akses oleh publik	Percepatan Pembinaan dalam penyusunan laporan kinerja (SAKIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pembinaan Penyusunan SAKIP Prov, Kab/ Ko se Sumatera Selatan</li> <li>- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)</li> </ul>

	4. Sasaran 1.4 Pelayanan Administrasi Perkantoran		
<b>MISI IV : Membangun dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Tersedianya data base kebutuhan inovasi dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Jumlah media yang digunakan</li> <li>2. Peningkatan Jumlah jenis data dan informasi yang tersedia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah media yang digunakan</li> <li>2. Meningkatkan Jumlah jenis data dan informasi yang tersedia</li> </ol>
	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia</li> <li>2. Peningkatan peralatan pendukung KDH/WKDH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia</li> <li>2. Meningkatkan peralatan pendukung kerja kantor</li> </ol>
<b>MISI V : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Sasaran Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi</li> <li>- Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas keamanan</li> </ul>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia</p>
Terwujudnya masyarakat madani	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Penguatan pengetahuan, sikap dan Praktek Keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani dan religius</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama</li> <li>- Memfasilitasi Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan</li> <li>- Mewujudkan Satu Desa Satu Rumah Tahfidz</li> <li>- Mendorong Penguatan pengetahuan, sikap dan Praktek Keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani dan religius</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input, output, outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 yaitu :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019				Tahun 2020							
						Kinerja		Anggaran (Rp.)		Kinerja		Anggaran (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Urusan Wajib														
			Terkait Pelayanan Dasar														
			SEKRETARIAT DAERAH														
		4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	54,514,830,357	47,379,231,495	100%	100%	57,593,530,165	49,236,134,818		Palembang		
		4.01.03.01.19	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah orang Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	20 Orang	20 Orang	620,880,000	620,880,000	20 Orang	20 Orang	620,880,000	620,880,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang		
		4.01.03.01.33	2	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	20 Kali	70 Kali	507,000,000	505,630,700	80 Kali	85 Kali	317,400,000	316,200,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang		
		4.01.4.01.03.01.10	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 jenis ATK untuk 1 tahun	25 jenis ATK untuk 1 tahun	25 Jenis	15,000,000	14,970,500	28 Jenis ATK untuk 1 tahun	18 Jenis ATK untuk 1 tahun	13,500,000	12,985,100	Biro Hukum	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.19	4	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah tenaga honor yang mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	4 org	18 Org	228,520,000	124,176,000	23 Org	23 Org	424,320,000	125,000,000	Biro Hukum	Palembang		
		4.01.4.01.03.01.33	5	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Frekuenpsi koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	25 kali	25 kali	20	283,380,000	165,558,200	53 Kali	32 Kali	236,540,000	135,652,520	Biro Hukum	Palembang	
			4.01.03.01.xx	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	12 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	-	15,000,000	---	---	---	Biro kesra	Palembang	
			4.01.4.01.03.00 01. 19	7	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	15 Orang	18 Orang	18 Orang	-	463,480,000	18 Orang	18 Orang	608,760,000	610,740,000	Biro kesra	Palembang
		4.01.4.01.03.00 01. 33	8	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	60 Kali	60 Kali	-	877,350,000	60 Kali	60 kali	661,240,000	491,610,000	Biro kesra	Palembang		
		4.01.03.01.xx	9	Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Sumsel	Jumlah Tutor dan Peserta yang Mengikuti SKJ	5 Tutor dan 400 Orang Peserta SKJ	5 Tutor dan 400 Orang Peserta SKJ	-	309,020,000	-	-	-	-	-	Biro kesra	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.19	10	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Menyediakan 3 orang tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	3 orang	3 orang	100%	93,132,000	93,132,000	3 Orang	100%	101,790,000	101,790,000	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.33	11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	23 kali	48 kali	100%	200,000,000	200,000,000	49 Kali	100%	289,000,000	289,000,000	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.10	12	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	-	-	-	-	-	19 Jenis	100%	30,396,300	30,396,300	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.10	13	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	47,200,000	47,200,000	Biro Adm. Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.19	14	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah jasa pendukung administrasi teknis/ perkantoran yang tersedia	6 Orang	6 Orang	6 Orang	186,000,000	186,000,000	6 Orang	6 Orang	203,580,000	203,580,000	Biro Adm. Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.00 01. 33	15	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan.	20 Kali	20 Kali	20 Kali	250,000,000	250,000,000	20 Kali	20 Kali	350,000,000	350,000,000	Biro Adm. Pembangunan	Palembang	

		4.01.4.01.03.01.xx	16	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	-	3 Bulan	3 Bulan	75,000,000	75,000,000	1 Tahun	-	250,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.01.xx	17	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengelola adm Keuangan	-	3 Bulan	3 Bulan	750,000	750,000	1 Tahun	-	3,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.01.xx	18	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Aset dan bangunan kantor yang bersih	-	3 bidang	3 bidang	50,000,000	45,362,000	1 Tahun	-	100,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.01.xx	19	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK Di Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	3 Bulan	3 Bulan	75,000,000	75,000,000	1 Tahun	-	25,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.01.xx	20	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan di lingkungan setda	-	1000 dokumen	880 dokumen	100,000,000	88,555,000	1 Tahun	-	25,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.01.xx	21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan di lingkungan setda	-	3 Bulan	3 Bulan	50,000,000	46,500,000	-	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.01.xx	22	Penyediaan Makan Minum	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat/kegiatan	-	4 kali	4 kali	25,750,000	25,750,000	1 Tahun	-	25,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.01.xx	23	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga kerja lainnya	-	15 orang	15 orang	234,900,000	234,900,000	15 Org	-	508,950,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.01.xx	24	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilakukan	-	40 kali	40 kali	300,000,000	300,000,000	1 Tahun	-	300,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		1.20.03.01.01.19	25	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Menyediakan Tenaga Outsourcing yang dibutuhkan	0	100%	72,48%	405,840,000	270,000,000	100%	90,39%	450,450,000	407,169,000	Biro Organisasi	Palembang
		1.20.03.01.01.75	26	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah.	Melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	0	100%	73,09%	477,472,000	166,256,076	100%	58,62%	223,294,375	130,894,375	Biro Organisasi	Palembang
		4.01.4.01.03.01.01	27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah administrasi Surat Masuk dan Keluar	2000 surat	4500 surat	4500 surat	90,000,000	75,729,200	3,000 Surat	3,000 Surat	75,500,000	75,491,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.02	28	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Jumlah tagihan Telpon, Air dan listrik yang dikelola BUP	26 aset bangunan dan gedung kantor	26 aset bangunan dan gedung kantor	26 aset	6,700,000,000	6,050,492,275	26 aset	26 aset	6,321,964,100	5,372,496,280	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.03	29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pelaksanaan acara yang terfasilitasi oleh Pemprov.	15 acara	15 acara	600 acara	3,000,000,000	2,516,600,000	1500 Acara	1500 Acara	6,500,000,000	6,492,460,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.05	30	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekapitulasi aset dan gedung yang difasilitasi asuransi	R4=85 unit Gedung = 21 unit	R4=85 unit Gedung = 21 unit	84 unit R4, gedung 21 unit	791,425,000	725,372,689	85 unit R4, gedung 21 unit	85 unit R4, gedung 21 unit	791,425,000	750,465,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.06	31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelaksanaan pelunasan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	200 unit	200 unit	195 unit	350,000,000	247,400,176	195 unit	195 unit	350,000,000	349,904,500	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.07	32	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengelola administrasi keuangan	11 orang	11 orang	11 org	50,000,000	42,900,000	11 org	11 org	50,000,000	47,575,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.08	33	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah terlaksananya pelayan administrasi perkantoran melalui aset/bangunan/gedung yang bersih, nyaman, tertata rapi dan indah	7 aset bangunan dan gedung kantor	7 aset bangunan dan gedung kantor	7 aset	1,418,163,000	1,091,823,350	7 aset	7 aset	1,394,469,700	1,186,591,900	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.10	34	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK di lingkungan Setda	114 item	114 item	114 item	800,000,000	619,994,488	100 item	100 item	537,496,600	537,409,100	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.11	35	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen cetakan dan penggandaan di lingkungan Setda	37 jenis cetakan	37 jenis cetakan	37 dok/jenis	400,000,000	430,518,815	30 dok/jenis	30 dok/jenis	200,000,000	199,827,250	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.12	36	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan/gedung/kantor untuk 26 aset	26 jenis, 2 perbaikan instalasi	26 jenis, 2 perbaikan instalasi	26 aset	600,000,000	399,050,100	26 aset	26 aset	900,000,000	897,859,500	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.17	37	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah acara makanan dan minuman yang dibutuhkan untuk rapat/kegiatan/tamu	1.044 kali acara	1.044 kali acara	1197 acara	15,083,581,557	12,200,000,000	1150 acara	1150 acara	10,025,000,000	8,005,700,700	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.01.19	38	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah orang tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	289 orang	289 orang	265 org	9,813,886,800	8,453,128,000	440 orang	440 orang	12,727,780,000	12,230,395,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang

		4.01.4.01.03.01.29	39	Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas	Jumlah unit kendaraan sewa mobilitas darat	400 unit	400 unit	400 unit	1,200,000,000	1,090,349,000	300 Unit	300 Unit	875,000,000	874,343,750	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.33	40	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	2000 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	2000 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	1250 kali (dm dan luar daerah)	8,900,750,000	7,209,162,926	1200 kali (dm dan luar daerah)	1200 kali (dm dan luar daerah)	7,419,094,090	5,097,018,543	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.01	41	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	5000 Materai	5000 Materai	5000 Materai	30,000,000	30,000,000	8000 Materai	8000 Materai	48,000,000	48,000,000	Biro Humas Dan Protokol	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.08	42	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih	20 jenis	20 jenis	20 jenis	30,000,000	25,500,000	20 jenis	20 jenis	35,000,000	31,500,000	Biro Humas Dan Protokol	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.15	43	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Majalah	20 jenis	20 jenis	20 jenis	2,300,000	1,840,000	20 jenis	15 jenis	2,415,000,000	2,173,500,000	Biro Humas Dan Protokol	Palembang	
		4.01.4.01.03.01.15	44	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah Honorarium	18 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang x 13 Bulan / 7 Orang x 6 bulan (juru Bicara Gub)	776,100,000	776,100,000	25 Orang	25 Orang x 13 Bulan dan TKPD	812,500,000	812,500,000	Biro Humas Dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.01.33	45	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Ke Luar Negeri	50 kali	25 kali	25 kali	300,000,000	240,000,000	25 kali	10 Kali	300,000,000	180,000,000	Biro Humas Dan Protokol	Palembang	
		4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	50,151,898,250	33,531,470,118	100%	100%	88,281,989,940	79,058,045,781		Palembang
		4.01.4.01.03.02.12	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	-	2 (dua) unit Laptop & 2 (dua) unit GPS	2 (dua) unit Laptop & 2 (dua) unit GPS	70,000,000	70,000,000	3 (tiga) unit komputer, 3 (tiga) unit printer, 3 (tiga) unit laptop serta 3 (tiga) unit Ac 1 PK	3 (tiga) unit komputer, 3 (tiga) unit printer, 3 (tiga) unit laptop serta 3 (tiga) unit Ac 1 PK	150,000,000	150,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
		4.01.4.01.03.02.12	2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	10 jenis	10 Jenis	280,000,000	280,000,000	6 jenis	8 Jenis	189,000,000	189,000,000	Biro Hukum	Palembang	
			3	(Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	1 Jenis	1 Jenis	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	Biro Hukum dan HAM	Palembang	
		4.01.4.01.03.00.02.12	4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik	3 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	133,500,000	133,500,000	22 Jenis	22 Jenis	106,000,000	144,910,000	Biro kesra setda prov sumsel	Palembang	
		4.01.4.01.03.00.02.xx	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	---	---	-	-	Biro kesra setda prov sumsel	Palembang	
		4.01.4.01.03.00.05.18	6	Kontribusi Pelatihan, Seminar dan Simposium dll	Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Seminar dan Simposium dll	-	-	-	-	-	---	6 Orang	-	30,000,000	Biro kesra setda prov sumsel	Palembang	
		4.01.4.01.03.02.12	7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2 Jenis	100%	54,592,250	54,592,250	5 Jenis	100%	35,000,000	35,000,000	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.02.12	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	100%	100%	100%	101,000,000	101,000,000	100%	100%	102,800,000	102,080,000	Biro Adm. Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.02.32	9	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan roda empat	Jumlah kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang tersedia	3	3	3	-	-	3	3	20,000,000	-	Biro Adm. Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.02.xx	10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi	-	17 jenis	17 jenis	1,650,000,000	1,448,498,389	85 Unit	-	300,000,000	-	Biro PBJ	Palembang	
		4.01.4.01.03.02.xx	11	pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi	-	3 bidang	3 bidang	200,000,000	195,000,000	1 Tahun	-	-	-	Biro PBJ	Palembang	
		1.20.02.01	12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	-	100%	91,77%	180,000,000	27,530,000	100%	99,75%	99,500,000	99,500,000	Biro Organisasi	Palembang	
		4.01.4.01.03.02.05	13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang anggarkan	5 unit	5 unit mobil-motor	5 unit mobil-motor	10,642,136,000	9,704,231,097	20 unit R4	20 unit R4	16,749,934,195	16,712,185,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	

		4.01.4.01.03.02.12	14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dianggarkan	250 jenis	350 item	350 item	8,345,700,000	8,173,116,099	511 item	511 item	21,539,749,000	19,261,998,703	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.13	15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga pimpinan	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	3 unit	3 unit	6,000,000,000	994,313,200	3 unit (Rumah Jabatan Gub, Wagub dan Sekda)	3 unit (Rumah Jabatan Gub, Wagub dan Sekda)	6,500,000,000	2,954,797,162	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.20	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah kenyamanan rumah jabatan secara baik	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	3 rumah jabatan	3 rumah jabatan	5,000,000,000	2,464,485,930	3 unit (Rumah Jabatan Gub, Wagub dan Sekda)	3 unit (Rumah Jabatan Gub, Wagub dan Sekda)	4,200,000,000	3,924,887,490	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.21	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah kenyamanan rumah dinas secara baik	4 rumah dinas	3 rumah dinas	3 rumah dinas	400,000,000	99,083,600	3 unit (Rumah Dinas lingkar istana)	3 unit (Rumah Dinas lingkar istana)	800,000,000	599,967,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.22	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah aset bangunan dan gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik	26 aset	26 aset	26 aset	5,000,000,000	3,783,344,403	26 aset	26 aset	20,309,381,745	17,982,479,766	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.24	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin dan baik	195 unit mobil-motor	195 unit mobil-motor	195 unit mobil-motor	3,587,130,000	3,303,418,000	230 unit mobil-motor	230 unit mobil-motor	4,700,000,000	4,698,456,810	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.32	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara secara rutin dan baik	26 aset	26 aset	26 aset	950,000,000	720,000,000	26 aset	26 aset	1,100,000,000	1,098,779,500	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.41	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah paket kegiatan dan luas bangunan yang akan di rehab	3 unit (Rumah Jabatan Gub, Wagub dan Sekda)	0	0	0	0	3 unit (Rumah Jabatan Gub, Wagub dan Sekda)	3 unit (Rumah Jabatan Gub, Wagub dan Sekda)	7,590,000,000	7,124,068,550	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.42	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah paket kegiatan dan luas bangunan gedung kantor yang akan di rehab	26 aset bangunan dan gedung kantor	11 aset gedung	11 aset gedung	7,460,000,000	1,721,857,150	11 aset gedung	11 aset gedung	3,679,000,000	3,354,935,800	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02.81	23	Pelayanan KDH/WKDH Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan KDH/WKDH Prov. Sumsel	4 Orang	4 Orang	0 Orang	17,640,000	0	4 Orang	0 Orang	11,025,000	0	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.0103.02.12	24	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang baik	20 jenis	20 jenis	20 jenis	200,000	180,000,000	20 jenis	1 Paket	600,000	510,000,000	Biro Humas Dan Protokol	Palembang
		4.01.4.0103.02.32	25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	10 jenis	50,000,000	47,500,000	10 jenis	10 jenis	100,000,000	85,000,000	Biro Humas Dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	3,883,600,000	2,782,896,500	100%	100%	3,100,314,000	3,075,850,500		Palembang
		4.01.4..01.xx	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.4.01.xx	2	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas har-hari tertentu beserta kelengkapannya yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.4.01.03.03	3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu yang tersedia	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Biro Hukum	Palembang
		4.01.03.00.03.02	4	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	-	-	-	-	-	56 Orang	---	71,232,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.03.02	5	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia	-	-	-	-	-	41 Orang	---	34,768,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.03.05	6	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-	-	56 Orang	---	142,464,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.4.01.03.03	7	Pengadaan Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah pakaian kerja	-	-	-	-	-	120 Stel	-	120,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.02	8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	2 Orang (KDH dan WKDH)	130 orang	130 orang	2,434,300,000	1,444,895,000	250 Stel	250 Stel	1,850,000,000	1,845,833,500	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang

		4.01.4.01.03.09	9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Acara HUT RI	Meningkatnya disiplin aparatur melalui peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dengan tertib dan hikmad	1 Kegiatan	11 acara	11 acara	1,250,000,000	1,138,701,500	11 acara	11 acara	881,500,000	880,017,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.02	10	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	109	109 Orang/2 stel	109 Orang/2 stel	199,300,000	199,300,000	109 Orang/2 stel	2 Stel/95 Orang	350,000	350,000,000	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		<b>4.01.4.01.03.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,573,729,000</b>	<b>1,495,196,471</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,999,374,500</b>	<b>1,042,851,570</b>		<b>Palembang</b>
		4.01.4.01.03.05.xx	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.4.01.03.05.01	3	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	-	-	2 orang	-	22,240,000	-	Biro Hukum	Palembang
		4.01.4.01.03.05.03	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum	Palembang
		4.01.4.01.03.05.21	5	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	-	3 orang	-	30,750,000	-	4 Orang	-	73,400,000	-	Biro Hukum	Palembang
		4.01.4.01.03.05.22	6	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building	-	3 orang	-	40,700,000	-	-	-	-	-	Biro Hukum	Palembang
		4.01.4.01.03.00.05	7	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	3 Orang	7 Orang	7 Orang	-	52,125,000	6 Orang	1 Orang	106,000,000	22,125,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.4.01.03.00.56	8	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	---	---	---	---	---	---	4 orang	---	73,400,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.4.01.03.00.85	9	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID)	Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	3 orang	-	60,750,000	-	---	---	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.05.xx	10	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti Capacity Building	3 orang	3 orang	3 orang	-	40,700,000	-	---	---	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.05.xx	11	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	3 orang	-	25,750,000	-	---	---	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.05.xx	12	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek SAKIP	3 orang	3 orang	3 orang	-	23,700,000	-	---	---	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.4.01.03.05.36	13	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	-	2 Orang	100%	40,460,000	40,460,000	Biro Perekonomiam	Palembang
		4.01.4.01.03.05.36	14	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pim III dan IV	2 orang	2 orang	2 orang	42,000,000	42,000,000	2 orang	2 orang	62,585,000	42,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Palembang
		4.01.4.01.03.05.03	15	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset	0 Orang	0 Orang	0 Orang	121,000,000	121,000,000	0 Orang	0 Orang	75,000,000	45,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Palembang
		4.01.4.01.03.05.04	16	Pembinaan LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	-	0 Orang	0 Orang	73,400,000	-	Biro Administrasi Pembangunan	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	17	Kontribusi Seminar, Simposium	Jumlah Seminar, Pelatihan yang diikuti	-	20 kali	10 kali	100,000,000	40,500,000	20 Kali	-	200,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	18	Bintek Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Bintek yang diadakan	-	4 kali	1 kali	200,000,000	88,908,200	4 kali	4 kali	150,000,000	-	Biro PBJ	Palembang

		4.01.4.01.03.05.xx	19	Pendampingan Hukum Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan	-	3 Bulan	3 Bulan	100,000,000	40,000,000	1 Tahun	1 tahun	150,000,000	29,750,000	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	20	Penyelesaian Sengketa Kontrak	Jumlah sengketa yang pengadaan barang yang diselesaikan	-	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	30,000,000	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	5,000,000	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	21	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	30 org	30 org	100,000,000	20,000,000	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	22	Pembinaan Lembaga Pengadaan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan yang dilakukan	-	-	-	-	-	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100,000,000	14,900,000	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	23	Rapat Koordinasi (Rakor) LPSE Se-Sumsel	Jumlah Rakor yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	75,000,000	9,727,500	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	24	Pengembangan Aplikasi SPSE ver. 4.3	Jumlah Aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	-	50,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	25	Bintek Aplikasi SPSE	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	26	Pelatihan Sirup Versi 4.3 Bagi OPD Dilingkungan Pemerintah Prov Sumsel	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek	-	-	-	-	-	100 Org	100 Org	100,000,000	64,746,222	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	27	Pelatihan Sirup Bagi OPD Dilingkungan Pemerintah Prov Sumsel	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	28	Monev LPSE 17 Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota Yang mengikuti	-	-	-	-	-	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100,000,000	26,950,000	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	29	Aplikasi Dasboard Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah aplikasi	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	-	100,000,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	30	Sewa Rak Collotion / DRC Server LPSE	Jumlah Rak yang di sewa	-	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	92,400,000	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	31	Sosialisasi Perpres dan Perlem	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	32	Sosialisasi PBJ Melalui Vidio	Jumlah Vidio	-	1 Paket	1 Paket	100,000,000	40,655,500	-	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	33	Pembuatan Website Biro PBJ	Jumlah Website	-	1 Website	1 Website	100,000,000	98,530,000	-	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	34	Pengembangan Website Biro PBJ	Jumlah Website	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	35	Penyusunan E-katalok Lokal	Jumlah Dokumen	-	1 Dok	1 Dok	150,000,000	119,608,100	-	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	36	Sewa Internet ULP	Output : Jumlah kapasitas (terabit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	37	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah/DID SAKIP Lokasi di luar Provinsi	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	1 Kali	-	73,400,000	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.05.01	38	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	19 orang	19 orang	268,968,000	142,000,000	19 orang	19 orang	157,628,500	40,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.05.03	39	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	9 Orang	13 orang	13 orang	200,000,000	77,000,000	13 orang	13 orang	111,200,000	9,800,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	40	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah/DID Kinerja SAKIP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan SAKIP	-	-	-	-	-	-	-	660,600,000	380,842,848	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	41	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID)	Jumlah aparat yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	3 orang	246,000,000	56,116,355	-	-	-	-	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	42	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Jumlah aparat yang mengikuti Capacity Building	3 orang	3 orang	3 orang	325,600,000	37,400,000	-	-	-	-	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.05.xx	43	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah aparat yang mengikuti Benchmarking	-	3 orang	3 orang	206,000,000	156,784,516	-	-	25,750,000	25,750,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang

		4.01.4.01.03.05.01	44	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Aparatur PIM II : 1 org x 1 kali. PIM III : 1 org x 1 kali. PIM IV : 2 org x 1 kali	100%	75%	4 Orang	92,711,000	74,168,800	75%	4 Orang	92,711,000	-	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.05.03	45	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Aparatur; BM/OL : 7 org x 1 kali. Tanpa BM/Tanpa OL : 16 org x 1 kali.	100%	75%	23 Orang	150,000,000	127,500,000	75%	23 Orang	150,000,000	100,000,000	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		<b>1.20.03.06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>695,900,000</b>	<b>503,110,312</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,271,336,500</b>	<b>1,013,722,661</b>		<b>Palembang</b>
		1.20.03.06.xx	1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran Yang di susun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.06.xx	2	Kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Internal Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Internal Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	---	1 Dokumen	---	32,000,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.06.xx	3	Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan dan evaluasi Internal Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengelolaan Ketatausahaan dan evaluasi Internal Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	---	1 Dokumen	---	32,000,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.4.01.03.00.06.19	4	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis LAKIP	-	-	-	-	---	-	2 orang	-	26,600,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.4.01.03.05.04	5	Pembinaan LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0 orang	0 orang	0 orang	-	-	0 orang	0 orang	26,600,000	26,600,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang
		4.01.4.01.03.16	6	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah/ DID Kinerja SAKIP	Persentase koordinasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 Kali	-	26,600,000	-	Biro PBJ	Palembang
		1.20.06.03.17	7	Benchmarking perencanaan pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	-	100%	67,28%	30,750,000	20,690,000	100%	93,76%	74,736,500	70,073,500	Biro Orgnisasi	Palembang
		1.20.03.26	8	Capacity Building SDM Aparatur di Bidang perencanaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building	-	100%	57,79%	40,700,000	23,520,000	100%	76,62%	50,000,000	38,307,500	Biro Orgnisasi	Palembang
		1.20.03.01.01	9	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	-	100%	76,11%	25,750,000	19,598,000	100%	95,22%	73,400,000	69,895,000	Biro Orgnisasi	Palembang
		1.20.03.01.01.10	10	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimteks SAKIP	-	100%	76,60%	23,700,000	18,202,180	100%	86,94%	26,600,000	23,125,000	Biro Orgnisasi	Palembang
		1.20.06.03.17	11	Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan Bahan Rapat	Mengelola Laporan dan bahan rapat yang akurat sesuai kebutuhan	-	100%	49,09%	50,000,000	24,845,550	100%	89,55%	300,000,000	268,638,080	Biro Orgnisasi	Palembang
		1.20.03.26	12	Penyusunan RENSTRA Setda	Menyediakan Dokumen RENSTRA Setda	-	100%	25,56%	100,000,000	25,564,396	100%	90,58%	125,000,000	113,230,080	Biro Orgnisasi	Palembang
		4.01.4.01.03.06.01	13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	50,000,000	49,296,000	10 dokumen	10 dokumen	30,000,000	28,997,955	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.06.06	14	Penyusunan RKA/DPA	Jumlah Buku RKA / DPA	60 dok/buku RKA/DPA	60 dok/buku RKA/DPA	60 dok/buku RKA/DPA	50,000,000	49,985,600	60 dok/buku RKA/DPA	60 dok/buku RKA/DPA	85,000,000	83,086,650	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.06.08	15	Inventarisasi Aset di Lingkungan Setda	Jumlah Buku inventarisasi aset Pemprov. Sumsel	12 dokumen KIB A-E	12 dokumen KIB A-E	12 dokumen KIB A-E	125,000,000	123,007,700	12 dokumen KIB A-E	12 dokumen KIB A-E	50,000,000	35,812,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.06.12	16	Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan Non Aktif	Jumlah pendataan dan penataan arsip aktif dan non aktif	2000 arsip	4000 arsip	4000 arsip	100,000,000	49,727,250	4000 arsip	4000 arsip	25,000,000	24,988,600	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.06.18	17	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga Prov. Sumsel	60 eks	60 eks	60 eks	100,000,000	98,673,636	60 eks	60 eks	75,000,000	68,776,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01.4.01.03.xx	18	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	239,400,000	135,592,296	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang

		<b>4.01.4.01.03.05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Dana Insentif Daerah Kinerja Sakip dengan Nilai A)</b>	<b>Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>321,250,000</b>	<b>276,937,700</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>126,600,000</b>	<b>100,000,000</b>		<b>Palembang</b>
		4.01.4.01.03.05.23	1	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	-	3 orang	-	25,750,000	-	1 laporan	-	26,600,000	-	Biro Hukum	Palembang
		4.01.4.01.03.05.24	2	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	-	3 orang	3	23,700,000	18,765,200	-	-	-	-	Biro Hukum	Palembang
		4.01.4.01.03.02.12	3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dana Insentif Daerah Kinerja Perencanaan Terbaik)	Jumlah Laptop tersedia	-	1 unit	100%	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.05	4	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	-	3 orang	100%	30,750,000	30,750,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.05	5	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building	-	3 orang	100%	40,700,000	40,700,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.05	6	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	-	3 orang	100%	25,750,000	25,750,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.05	7	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	-	3 orang	100%	23,700,000	23,700,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.05	8	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan SAKIP	-	-	-	-	-	4 Orang	100%	73,400,000	73,400,000	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.05	9	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP)	Jumlah Laporan yang disusun	-	-	-	-	-	1 Laporan	100%	26,600,000	26,600,000	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.05	10	Kegiatan Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti benchmarking	-	3 orang	3 orang	30,750,000	26,137,500	-	-	-	-	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.05	11	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building	-	3 orang	3 orang	40,700,000	36,630,000	-	-	-	-	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.05	12	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti benchmarking	-	3 orang	3 orang	25,750,000	23,175,000	-	-	-	-	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.05	13	Kegiatan Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis SAKIP	-	3 orang	3 orang	23,700,000	21,330,000	-	-	-	-	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		<b>4.01.03.15</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Presentase Anggota Dewan yang Meningkat Kapasitasnya</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>320,000,000</b>	<b>310,776,334</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>191,875,000</b>	<b>187,987,455</b>	<b>Biro Pemerintahan dan OTDA</b>	<b>Palembang</b>
		4.01.03.15.09	1	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Lembaga Legislatif di Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Kunjungan Kunker DPD RI, DPR RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	40 Kali	45 Kali	50 Kali	120,000,000	114,797,300	50 Kali	53 Kali	59,875,000	58,098,589	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.15.10	2	Verifikasi Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terverifikasi	65 Dok	65 Dok	70 Dok	200,000,000	195,979,034	42 Dok	45 Dok	132,000,000	129,888,866	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		<b>4.01.03.16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang Meningkat Pelayanannya</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>970,000,000</b>	<b>906,845,187</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,229,040,400</b>	<b>1,216,247,780</b>	<b>Biro Pemerintahan dan OTDA</b>	<b>Palembang</b>
		4.01.03.16.01	1	Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)	Jumlah buku RLPPD yang disusun	10 Buku	10 Buku	10 Buku	150,000,000	135,927,136	10 Buku	10 Buku	25,000,000	24,916,800	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.08	2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah buku LPPD Prov. Sumsel	50 Buku	50 Buku	50 Buku	150,000,000	140,987,285	50 Buku	50 Buku	133,125,000	132,662,950	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang

		4.01.03.16.09	3	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan	Jumlah buku LKPI Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran	3 buku	3 buku	3 buku	100,000,000	98,429,250	3 buku	3 buku	145,192,000	145,192,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.13	4	Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Sumsel ke Luar Negeri	Jumlah Izin yang diterbitkan/dikeluarkan	37 Surat	15 Surat	20 Surat	60,000,000	45,155,513	45 Surat	50 Surat	53,125,000	52,586,281	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.19	5	Penyelenggaraan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Jumlah Partisipasi Aktif Provinsi dalam APPSI	6 Kali Rapart/Pertemuan	6 Kali Rapart/Pertemuan	6 Kali Rapart/Pertemuan	250,000,000	246,615,128	6 Kali Rapart/Pertemuan	6 Kali Rapart/Pertemuan	187,024,700	182,972,100	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.20	6	Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	8 KDH/WKDH	1 KDH/WKDH	0 KDH/WKDH	-	-	7 KDH/WKDH	0 KDH/WKDH	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.23	7	Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan dan Desk Pilkada yang dilaksanakan	8 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	274,025,000	270,268,751	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.25	8	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	34 Kec	34 Kec	34 Kec	60,000,000	45,155,513	75 Kec	75 Kec	174,283,700	171,707,003	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.26	9	Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Sumsel	Jumlah buku Memori Jabatan yang disusun	10 Buku	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.XX	10	Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2010	Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.XX	11	Pembinaan Aparatur Kelurahan tentang Dana Bantuan Kelurahan (Permendagri Nomor 130 Tahun 2018)	Jumlah Aparatur Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan	0	0	0	200,000,000	194,575,362	1170 Aparatur Kelurahan	1170 Aparatur Kelurahan	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.XX	12	Pemantauan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di kabupaten/Kota se Sumsel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	0	1 laporan	1 laporan	-	-	1 laporan	1 laporan	237,265,000	235,941,895	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.16.XX	13	Pemantauan Pelaksanaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Provinsi Sumsel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Provinsi Sumsel	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		<b>4.01.03.27 Program Penataan Daerah Otonom Baru</b>		<b>Prosentase Tertatinya Daerah Otonomi Baru (DOB)</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,518,516,000</b>	<b>1,490,063,867</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>767,528,627</b>	<b>758,819,811</b>	<b>Biro Pemerintahan dan OTDA</b>	<b>Palembang</b>	
		4.01.03.27.01	1	Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan	Jumlah Pembentukan Pemekaran Kecamatan	6 Kec	2 Kec	2 Kec	60,000,000	57,609,556	2 Kec	2 Kec	80,046,625	79,513,206	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.27.03	2	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah penyelesaian tapal batas	10 Batas Bermasalah, 10 Pelacakan Batas, 3 Batas Provinsi dan Rekonstruksi Batas	10 Batas Bermasalah, 10 Pelacakan Batas, 3 Batas Provinsi dan Rekonstruksi Batas	882,158,000	863,011,711	10 Batas Bermasalah, 10 Pelacakan Batas, 3 Batas Provinsi dan Rekonstruksi Batas	10 Batas Bermasalah, 10 Pelacakan Batas, 3 Batas Provinsi dan Rekonstruksi Batas	373,346,530	367,387,665	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
		4.01.03.27.05	3	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Daerah Otonom Baru	Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda yang dilaksanakan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.27.06	4	Pembakuan Rupa Bumi	Jumlah Lokasi Penamaan Rupa Bumi yang teridentifikasi	3 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	90,000,000	84,713,200	3 Lokasi	3 Lokasi	76,870,472	75,977,045	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang

		4.01.03.27.08	5	Perapatan, Pemeliharaan, Rekonstruksi dan Pemasangan Pilar Permanen Batas Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah Pilar Permanen yang terpasang	20 Pilar	6 Pilar	6 Pilar	486,358,000	484,729,400	60 Pilar	60 Pilar	237,265,000	235,941,895	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.27.10	6	Pembinaan dan Rapat Kerja Regulasi Otonomi Daerah tentang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Rapat Kerja Regulasi Otonomi Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.55	Program Kerjasama Wilayah Perbatasan		Prosentase Kerjasama yang terfasilitasi		100%	100%	295,000,000	277,491,167	100%	100%	283,625,000	280,842,131	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.55.01	1	Rapat Koordinasi Gubernur se SUMATERA	Jumlah Rakorgub yang dihadiri dan ikuti	4 MoU (11 Provinsi se SUMA TERA)	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.55.03	2	Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Antar Daerah, Luar Negeri dan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	18 MoU	20 MoU	25 MoU	175,000,000	166,883,318	30 MoU	35 MoU	104,125,000	103,067,316	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.03.55.08	3	Pelaksanaan Pemantauan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kab/Kota di Prov. Sumsel	Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120,000,000	110,607,849	1 Laporan	1 Laporan	179,500,000	177,774,815	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Percentase Penetapan Peraturan Per Undang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	1,815,815,400	1,343,160,275	100%	100%	1,652,262,500	1,171,054,241	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.06	1	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.	Jumlah produk hukum Kab/Kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	170 Produk Hukum Kab/Kota	170 Produk Hukum Kab/Kota	185 Produk Hukum Kab/Kota	265,000,000	165,389,100	170 Produk Hukum Kab/Kota	177 Produk Hukum Kab/Kota	200,080,000	116,414,800	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.07	2	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditetapkan	13 Perda dan 50 Pergub	45 Perda & Pergub (10 Perda dan 35 Pergub)	8 (Perda) dan 32 (Pergub)	498,000,000	378,835,591	-	-	-	-	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.10	3	Penyusunan Himpunan Peraturan dan Penyebarluasan Informasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum.	Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan pusat dan daerah	1 keg	240 buku	240 Buku	40,000,000	39,040,000	240 buku	240 Buku	50,000,000	47,749,970	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.11	4	Penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	Jumlah perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintah Prov. Sumsel	7 Perkara	7 Perkara	9 Perkara	396,025,000	338,929,000	8 Perkara	8 Perkara	236,983,307	234,249,900	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.12	5	Penyalinan Hukum	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyalinan hukum.	150 orang (3 Kab/Kota)	200 orang (4 Kab/Kota)	4 Kab/Kota	120,000,000	113,209,700	200 orang (5 Kab/Kota)	5 Kab/Kota	190,770,000	178,314,855	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.13	6	Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah melalui media cetak	Jumlah produk hukum daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	4 Perda/ Pergub	4 Perda/ Pergub	1 Perda / 3 Pergub	70,000,000	69,003,000	4 Perda /Pergub	-	100,000,000	-	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.14	7	Penelitian dan penelaahan draft Keputusan Gubernur Sumsel	Jumlah Keputusan Gubernur yang dapat diselesaikan	700 Keputusan Gubernur	800 Keputusan Gubernur	761 Kep.Gub	65,000,000	56,405,760	780 Keputusan Gubernur	730 Kep.Gub	92,900,000	83,754,200	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.15	8	Pemberian bantuan Hukum cuma-cuma pada Masyarakat Miskin Sumsel	Jumlah Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin	1 Dok	6 kasus	-	100,000,000	-	9 kasus	-	-	-	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.17	9	Pemantauan dan evaluasi pengendalian program RANHAM dan koordinasi pelaksanaan HAM.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian program RANHAM Provinsi dan koordinasi pelaksanaan RANHAM Kab/Kota.	2 laporan	4 laporan	4 Laporan	86,790,400	86,276,518	4 laporan	4 Laporan	90,000,000	58,809,000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.18	10	Pembinaan dan pengembangan Sistem Informasi Hukum di Provinsi Sumsel.	Jumlah Kabupaten/kota yang dibina/monitoring dan produk hukum provinsi yang updating/upload ke website.	65 Perda & Pergub	45 Perda & Pergub (10 Perda, 35 Pergub)	8 Perda dan 32 Pergub	75,000,000	63,854,106	110 Perda/Pergub	110 Produk Hukum	90,250,000	78,623,114	Biro Hukum dan HAM	Palembang

		4.01.4.01.03.26.24	11	Rapat koordinasi penyelesaian permasalahan hukum perdamaian, pidana dan Tata Usaha Negara (TUN)	Jumlah rapat koordinasi penyelesaian permasalahan hukum perdamaian, pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang diselesaikan	-	4 kali	1 Kali	100,000,000	32,217,500	5 kali	3 Kali	190,837,500	83,378,670	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.25	12	Rapat Koordinasi dengan Kabag Hukum dan Sekretaris DPRD Kab/Kota	Terfasilitasinya produk hukum daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	1 Kali Rakor	1 Kali Rakor	62,700,000	56,236,094	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.26	13	Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	8 Perda	10 Perda	208,915,000	153,725,480	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.27	14	Penyusunan Peraturan Gubernur	Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur	-	-	-	-	-	37 Pergub	64 Pergub	138,826,693	79,798,158	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		<b>4.01.03.00.47</b>		<b>Program Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan</b>	<b>Persentase Bahan Kebijakan Bidang Keagamaan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>689,435,000</b>	<b>2,899,972,750</b>	<b>100%</b>	<b>---</b>	<b>13,003,400,000</b>	<b>16,858,842,600</b>	<b>Biro Kesra</b>	<b>Palembang</b>
		4.01.03.00.47.04	1	Kegiatan Keagamaan Prov. Sumsel	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	13,270,150	---	---	-	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.12	2	Fasilitasi Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan	Rumusan Kebijakan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	1 Dokumen	---	---	-	---	1 Dokumen	---	201,400,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.00.47.13	3	Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan Prov. Sumsel	Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan	---	---	---	-	---	1 Dokumen	1 Dokumen	1,749,000,000	1,220,725,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.00.47.13	4	Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Sumsel	Jumlah Pantita STQ	---	15 Orang	15 Orang	122,311,000	122,311,000	---	---	-	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.00.47.14	5	Pemberangkatan Kafilah STQ ke Tingkat Nasional	Jumlah yang Diberangkatkan	---	10 Orang	10 Orang	237,124,000	237,124,000	---	---	-	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.20	6	Fasilitasi MTQ/STQ	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan, Pelatihan dan Pemberangkatan MTQ/STQ	---	---	---	-	---	153 Pemenang, 57 Peserta, 100 Orang Kafilah Sumsel	153 Pemenang, 57 Peserta, 100 Orang Kafilah Sumsel	3,300,000,000	2,112,400,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.22	7	Pendaftaran dan Registrasi Rumah Tahfidz Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan	---	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1,416,125,000	---	---	-	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.22	8	Fasilitasi Pendaftaran dan Verifikasi Rumah Tahfidz	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendaftaran dan pembinaan rumah tahfidz	---	---	---	-	---	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	212,000,000	335,200,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.23	9	Pemberangkatan Kunjungan Religius	Rumusan Kebijakan Pemberangkatan Kunjungan Rohani yang difasilitasi	---	---	---	-	---	1 Dokumen	1 Dokumen	530,000,000	2,438,591,600	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.xx	10	Pembinaan dan Pelatihan Bilingual Mayit	Jumlah Peserta	---	100 Orang	100 Orang	-	175,175,000	---	---	-	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.xx	11	Rapat Koordinasi Amil Zakat dan Wakaf se-Sumsel	Rumusan Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan	---	1 Dokumen	1 Dokumen	-	300,000,000	1 Dokumen	---	318,000,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.xx	12	Pelayanan Jamaah Haji	Jumlah Fasilitasi Pengawasan Embarkasi, Debarkasi Haji serta seleksi Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD)	---	---	---	-	---	2 kali dan 1 kali seleksi TPHD	1 kali embarkasi, 1 kali debarkasi , 1 kali seleksi dan 1 kali Pembinaan TPHD/TKHD	901,000,000	542,675,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.xx	13	Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD)	Jumlah P2UKD yang difasilitasi	---	---	---	-	---	3318 Orang	3318 Orang	-	8,439,000,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.47.xx	14	Kegiatan Pemantauan dan Verifikasi Penerima Dana Bantuan Hibah di Bidang Keagamaan	Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan	---	1 Dokumen	1 Dokumen	-	315,967,600	---	---	---	---	Biro Kesra	Palembang

		4.01.03.00.47.xx	15	Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Gubernur di Bidang Keagamaan	Jumlah Kab/Kota yang menerima Dana Bantuan Gubernur di Bidang Keagamaan	---	---	---	-	---	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	212,000,000	343,425,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.48	16	Program Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Persentase Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	-	---	100%	---	1,571,000,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.48.06	17	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan, Pelatihan dan Pemberangkatan Festival Keagamaan	---	---	---	-	---	18 Pemenang Qasidah, 6 Peserta TC Qasidah, 10 Orang Kafilah Keberangkatan Qasidah	18 Pemenang Qasidah, 6 Peserta TC Qasidah, 10 Orang Kafilah Keberangkatan Qasidah	840,000,000	588,625,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.48.08	18	Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pondok Pesantren	Jumlah Kab/Kota	---	---	---	-	---	17 Kab/Kota	---	424,000,000	---	Biro Kesra	Palembang
		19	19	Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Tubuh	Jumlah ASN dan tenaga honorer yang mengikuti Senam	---	---	---	-	---	300 Orang	300 Orang	307,000,000	261,000,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.59	20	Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan	Persentase Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	120,000,000	---	---	---	-	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.59.11	21	Peningkatan Tim Pembina UKS se-Sumsel	Jumlah UKS Kab/Kota yang Dibina	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	120,000,000	---	--	--	-	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.xx	22	Rakor Kesra se-Sumsel	Jumlah peserta yang mengikuti	---	---	---	-	---	---	---	-	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.59	23	Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan	Persentase Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan yang ditindaklanjuti	1	100%	---	-	---	100%	---	1,219,000,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.59.05	24	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Analisa Kemiskinan	Jumlah Evaluasi, Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	---	---	---	-	---	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	180,000,000	189,751,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.59.07	25	Optimalisasi Dewan Pengupahan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Evaluasi, Pengawasan dan Koordinasi Dewan Pengupahan Kab/Kota	---	---	---	-	---	17 Kab/Kota	---	180,000,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.59.09	26	Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-UKS dan Tim Pembina Sekolah Sehat di Sumatera Selatan	Jumlah Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Kelembagaan TP-UKS	---	---	---	-	120,000,000	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	479,000,000	387,450,000	Biro Kesra	Palembang
		4.01.03.00.59.11	27	Rakor Kesra se-Sumsel	Rumusan Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan	---	---	---	-	200,000,000	1 Dokumen	---	380,000,000	---	Biro Kesra	Palembang
		4.01.4.01.03	Program Peningkatan Kinerja BUMD		Persentase BUMD yang memberikan kontribusi kepada PAD	-	100%	100%	672,275,750	672,275,750	85%	85%	527,000,000	527,000,000	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.51.14	1	Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Sumatera Selatan	Jumlah dokumen data perkembangan 15 BUMD di Sumatera Selatan	---	1 dokumen	100%	177,894,500	177,894,500	1 Dokumen	85%	150,000,000	150,000,000	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.51.16	2	Audit terhadap BUMD yang bermasalah	Menyediakan data audit BUMD di Sumatera Selatan	---	3 buku laporan audit	100%	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.51.17	3	Pembuatan Naskah Akademik BUMD	Menyediakan Naskah Akademik BUMD Sumatera Selatan	---	1 BUMD	100%	166,425,250	166,425,250	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.51.15	4	Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018	Menyediakan Bahan Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 sebagai pedoman BUMD Provinsi Sumatera Selatan	---	34 BUMD Prov. Sumsel	100%	177,956,000	177,956,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03.xx	5	Raperda Pembentukan dan Perubahan BUMD	Jumlah Raperda BUMD	---	-	-	-	-	3 Raperda	85%	377,000,000	377,000,000	Biro Perekonomian	Palembang
		4.01.4.01.03	Program Pembangunan Bidang Ekonomi		Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang Tersedia	100%	100%	100%	480,000,000	480,000,000	100%	100%	1,033,661,700	1,033,661,700	Biro Perekonomian	Palembang

		4.01.4.01.03.51.18	1	Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah dokumen data percepatan akses keuangan daerah	1 Dokumen	30 buku laporan	100%	95,000,000	95,000,000	1 dokumen	100%	173,000,000	173,000,000	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.51.11	2	Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah dokumen data pengendalian inflasi daerah yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100%	100,000,000	100,000,000	1 laporan	100%	304,115,750	304,115,750	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.51.12	3	Pemantauan Evaluasi Prog. Lintas Sektoral Pelaksanaan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) untuk Peningkatan Akses Permodalan di Sumatera Selatan	Menyediakan data dan jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dari BPN bagi MBR (UKM, Petani & Nelayan)	1 Dokumen	1 laporan	100%	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.51.21	4	Identifikasi Pelaksanaan CSR PKBL untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sumatera Selatan	Melaksanakan Identifikasi Pelaksanaan CSR PKBL untuk peningkatan perekonomian masyarakat di sumatera selatan	1 Dokumen	20 laporan	100%	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.51.22	5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan	Jumlah dokumen data penyaluran KUR oleh Bank Penyalur kepada UMKM	-	20 laporan	100%	95,000,000	95,000,000	1 laporan	100%	150,000,000	150,000,000	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.xx	6	Identifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Wilayah Sumatera Selatan	Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Provinsi Sumsel	-	-	-	-	-	1 dokumen	100%	100,000,000	100,000,000	Biro Perekonomian	Palembang	
		4.01.4.01.03.xx	7	Promosi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Negeri	Jumlah Pengembangan Investasi Promosi Produk dan Budaya Sumsel	-	-	-	-	-	2 pameran	100%	306,545,950	306,545,950	Biro Perekonomian	Palembang	
		<b>4.01.4.01.03.49</b>	<b>Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan</b>			<b>Percentase Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,550,000,000</b>	<b>2,420,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>111383500000%</b>	<b>920,000,000</b>	<b>Biro Adm Pembangunan</b>	<b>Palembang</b>
		4.01.4.01.03.49.09	1	Pembinaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Percentase pengadaan barang/jasa OPD (690 paket lelang; 7 kali diklat,bimtek,sosialisasi; konsultasi ke jkt; 3 kali rapat koordinasi)	100%	100%	100%	2,000,000,000	1,890,000,000	100%	100%	-	-	Biro Adm Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.49.10	2	Koordinasi Pelaksanaan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Jumlah dokumen hasil evaluasi TEPRA	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	200,000,000	185,000,000	1 Dok	1 Dokumen	300,000,000	145,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.49.12	3	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Desentralisasi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian Administrasi pembangunan Desentralisasi	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	1 Dok	1 Dokumen	-	-	Biro Adm Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.49.11	4	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dekonsektifikasi dan Dana Alokasi Khusus.	Jumlah Dokumen hasil Pengembinan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dekonsektifikasi dan Dana Alokasi Khusus	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	100,000,000	98,000,000	1 Dok	1 Dokumen	125,000,000	120,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.49.23	5	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan	Jumlah Dokumen hasil Pengembinan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.49.17	6	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non Vertikal	Jumlah Dokumen hasil Pengembinan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non Vertikal	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	75,000,000	74,500,000	1 Dok	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.49.18	7	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat.	Jumlah Dokumen hasil Pengembinan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat.	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dokumen	100,000,000	95,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang	
		4.01.4.01.03.49.19	8	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Perekonomian.	Jumlah Dokumen hasil Pengembinan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Perekonomian.	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dokumen	100,000,000	85,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang	

		4.01.4.01.03.49.20	9	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dokumen	113,835,000	100,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang
		4.01.4.01.03.49.13	10	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	100,000,000	98,000,000	1 Dok	1 Dokumen	125,000,000	125,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang
		4.01.4.01.03.49.22	11	Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (P4 Air Minum dan Sanitasi)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (P4 Air Minum dan Sanitasi)	1 Dokumen	1 Dok	1 Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	Biro Adm Pembangunan	Palembang
		<b>4.01.4.01.03.49</b>	<b>Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan</b>		<b>Outcome : Dokumen Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,756,100,000</b>	<b>1,363,927,383</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,422,000,000</b>	<b>3,374,472,152</b>		<b>Palembang</b>
		4.01.4.01.03.49	1	Pengelolaan pengadaan Barang/jasa	Persentase koordinasi yang dilaksanakan	0	300 Paket	300 Paket	2,756,100,000	1,363,927,383	600 Paket	600 Paket	3,422,000,000	3,374,472,152	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.49	2	Monitoring dan evaluasi pelaporan pengadaan barang dan jasa	Persentase Monitoring yang dilaksanakan	0	300 Paket	0	-	-	1 tahun	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.49	3	strategi pengadaan barang dan jasa	Persentase koordinasi yang dilaksanakan	0	300 Paket	0	-	-	1 tahun	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		4.01.4.01.03.49	4	Pengelolaan katalog lokal	Persentase E katalog yang dilaksanakan	0	300 Paket	0	-	-	1 tahun	-	-	-	Biro PBJ	Palembang
		<b>4.01.4.01.03.77</b>	<b>Program Peningkatan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah</b>		<b>Outcome : Persentase Laporan Kinerja yang dilaksanakan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 Dok</b>	<b>-</b>	<b>13,550,000</b>	<b>-</b>	<b>Biro PBJ</b>	<b>Palembang</b>
		4.01.4.01.03.77	1	Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan Bahan Rapat	Jumlah laporan	-	-	-	-	-	1 Dok	-	13,550,000	-	Biro PBJ	Palembang
		<b>1.20.03.26</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yg berlaku</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>64,93%</b>	<b>395,000,000</b>	<b>137,084,628</b>	<b>100%</b>	<b>87,81%</b>	<b>775,000,000</b>	<b>566,857,372</b>	<b>Biro Organisasi</b>	<b>Palembang</b>
		1.20.03.26.09	1	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Prov. Sumsel	Melaksanakan penataan Perangkat Daerah	19,95%	100%	64,03%	185,000,000	48,022,400	100%	91,30%	50,000,000	45,650,000	Biro Organisasi	Palembang
		1.20.03.26.08	2	Penyusunan Uraian Tugas dan Fungi Perangkat Daerah serta Penataan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Prov. Sumsel	Melaksanakan penyusunan Uraian Tugas dan Fungi serta UPTD	95,68%	100%	64,55%	85,000,000	48,412,228	100%	71,18%	425,000,000	302,520,436	Biro Organisasi	Palembang
		1.20.03.26.30	3	Pembinaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kab./Kota se-Sumsel	Melaksanakan pembinaan Perangkat Daerah dan UPTD Kab./Kota se-Sumsel sesuai dengan Peraturan	95,68%	100%	54,20%	125,000,000	40,650,000	100%	72,90%	300,000,000	218,686,936	Biro Organisasi	Palembang
		<b>1.20.03.30</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>Persentase Aparatur Yang dibina dan dikembangkan</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>30,18%</b>	<b>3,302,908,000</b>	<b>1,179,019,323</b>	<b>100%</b>	<b>58,84%</b>	<b>2,231,400,000</b>	<b>1,650,643,805</b>	<b>Biro Organisasi</b>	<b>Palembang</b>
		1.20.03.30.01	1	Pengelolaan dan penataan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Sumsel	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik dan tertib di Lingkungan Setda Prov. Sumsel	80,05%	100%	45,85%	100,000,000	45,846,300	100%	99,99%	25,000,000	24,997,500	Biro Organisasi	Palembang
		1.20.03.30.15	2	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumsel.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimteks Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	52,74%	100%	78,80%	480,000,000	378,263,800	100%	72,95%	1,128,200,000	822,992,955	Biro Organisasi	Palembang
		1.20.03.30.75	3	Rekonsiliasi dan Validasi Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Prov. Sumatra Selatan	Melaksanakan Rekonsiliasi dan Validasi Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Prov. Sumatra Selatan	52,74%	100%	21,90%	996,220,000	393,362,017	100%	75,31%	46,000,000	34,642,000	Biro Organisasi	Palembang
		1.20.03.30.21	4	Pembinaan SAKIP Kab./Kota se-Sumsel dan Penyusunan SAKIP Pemprov Sumsel	Menyediakan Dokumen SAKIP Prov. Sumsel	62,20%	100%	20,06%	325,000,000	65,207,583	100%	68,89%	250,000,000	174,716,200	Biro Organisasi	Palembang

		1.20.03.30.22	5	Bimbingan Teknis SAKIP Provinsi dan Kab./Kota	Meningkatkan Pemahaman ASN dalam penyusunan SAKIP	62,20%	100%	0,00%	340,000,000	-	100%	77,10%	250,000,000	192,756,200	Biro Organisasi	Palembang	
		1.20.03.30.06	6	Pelaksanaan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemprov Sumsel 2019-2023	Menyusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov Sumsel	40,27%	100%	50,36%	371,688,000	125,905,283	100%	82,43%	275,000,000	226,674,050	Biro Organisasi	Palembang	
		1.20.03.30.05	7	Pembinaan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel	Melaksanakan pembinaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Prov. Sumsel	30,13%	100%	26,06%	310,000,000	36,484,300	100%	64,06%	200,000,000	128,111,500	Biro Organisasi	Palembang	
		1.20.03.30.04	8	Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Kab./Kota se-Sumsel	melaksanakan pembinaan dan penilaian inovasi pelayanan publik di lingkungan Provinsi dan Kab./Kota	63,76%	100%	31,99%	250,000,000	63,985,990	100%	83,19%	50,000,000	41,594,000	Biro Organisasi	Palembang	
		1.20.03.30.08	9	Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Setda Prov. Sumsel	Meningkatkan penerapan nilai-nilai Budaya Kerja terhadap ASN Setda Prov. Sumsel	31,55%	100%	69,96%	130,000,000	69,964,050	100%	69,43%	7,200,000	4,159,400	Biro Organisasi	Palembang	
		1.20.03.05	<b>Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>			0%	100%	0,00%	20,000,000	-	100%	100,00%	20,000,000	20,000,000	Biro Organisasi	Palembang	
		1.20.03.05.01	1	Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (FORSESDAISI).	Terpenuhinya iuran wajib Sekda Provinsi Sumatera Selatan untuk FORSESDAISI	100%	100%	0,00%	20,000,000	-	100%	100,00%	20,000,000	20,000,000	Biro Organisasi	Palembang	
		4.01. 4.01.03.16	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>			Percentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	100%	100%	100%	3,328,000,000	4,112,009,000	100%	100%	6,753,000,000	6,713,738,125	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01. 4.01.03.16.07	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Acara/Kegiatan KDH/WKDH	Jumlah acara/kegiatan KDH/WKDH Pemprov. Sumsel	6 acara	150 acara	150 acara	3,328,000,000	4,112,009,000	300 acara	301 acara	6,753,000,000	6,713,738,125	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01. 4.01.03.16	<b>Program Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam mendukung tugas dan fungsi KDH Prov. Sumsel</b>			Percentase Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam mendukung tugas dan fungsi KDH Prov. Sumsel	0	0	0	0	0	100%	100%	1,358,250,000	486,250,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
		4.01. 4.01.03.16.xx	1	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur	Jumlah Laporan	0	0	0	0	0	3 Orang	3 Orang	559,250,000	199,250,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01. 4.01.03.16.xx	2	Focus Group Discussion Staf Ahli Kepala Daerah	Jumlah Dokumen FGD	0	0	0	0	0	3 Orang	3 Orang	642,000,000	287,000,000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01. 4.01.03.16.xx	3	Rapat Koordinasi Daerah Staf Ahli Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rakor	0	0	0	0	0	3 Orang	0	157,000,000	-	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		2.06.4.01.03.16	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH</b>			Percentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	100%	10,500,000,000	8,498,728,800	100%	100%	15,500,000,000	3,856,051,642	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		2.06.4.01.03.16.02	1	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-tamu Pimpinan	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-Tamu Pimpinan	150 kali	150 kali	150 Penerimaan Kunker	3,500,000,000	2,119,730,807	175 kali	150 Penerimaan Kunker	5,000,000,000	961,165,472	Biro Humas dan Protokol	Palembang	
		2.06.4.01.03.16.05	2	Kegiatan Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah	jumlah kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	50 kunker	50 kunker	50 kunker	3,500,000,000	3,482,419,587	50 kunker	50 kunker	5,000,000,000	1,627,671,445	Biro Humas dan Protokol	Palembang	
		2.06.4.01.03.16.11	3	Kegiatan Pelaksanaan Silaturahmi KDH/WKDH Provinsi Sumatera Selatan	jumlah silaturahmi KDH/WKDH Provinsi Sumatera Selatan	30 kali	30 kali	30 Silaturahmi	3,000,000,000	2,602,858,406	30 kali	30 Silaturahmi	5,000,000,000	874,966,040	Biro Humas dan Protokol	Palembang	
		2.06.4.01.03.16.27	4	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Keprotokolan Se-Sumsel	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Keprotokolan Se-Sumatera Selatan	85 orang	85 orang	85 Orang/Paket	500,000,000	293,720,000	85 orang	85 Orang/Paket	500,000,000	392,248,685	Biro Humas dan Protokol	Palembang	
		4.01.4.01.03.56	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			Percentase Kualitas Komunikasi dan Informasi	100%	100%	100%	28,227,889,000	29,352,428,814	100%	100%	40,180,900,000	31,179,921,830	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01.4.01.03.56.01	1	Kegiatan Dokumentasi dan Kliping	Jumlah Dokumentasi/Kliping	1000 dokumen	1000 dokumen	1000 Dsokumentasi/Kliping	150,000,000	149,996,000	1000 dokumen	960 Dokumentasi / Kliping	350,000,000	245,420,250	Biro Humas dan Protokol	Palembang	

		4.01,4.01.03.56.02	2	Kegiatan Penerbitan Informasi Pembangunan	Jumlah Cetakan Informasi Pembangunan	5 Edisi	5 Edisi	6 Edisi	2,500,000,000	2,466,832,233	5 Edisi	5 Edisi	4,500,000,000	2,263,360,845	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01,4.01.03.56.16	3	Kegiatan Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	-	15 kali	15 Kali	1,540,000,000	1,538,328,243	15 kali	15 Kali	2,000,000,000	1,007,846,803	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01,4.01.03.56.04	4	Kegiatan Pembuatan dan Penayangan Informasi Layanan Masyarakat	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat yang tersedia	3 tema	3 tema	3 Tema Iklan	1,200,000,000	1,134,405,492	3 tema	2 Tema Iklan	1,800,000,000	538,903,550	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01,4.01.03.56.05	5	Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	Jumlah Media Lokal, Nasional dan Mingguan	101 media	101 media	101 media	19,341,889,000	20,565,644,700	101 media	215 Media	27,000,000,000	24,324,249,535	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01,4.01.03.56.06	6	Kegiatan Peliputan Kunjungan Kerja KDH/WKDH dan Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-Tamu Pimpinan	Jumlah liputan Kegiatan Kunjungan Kerja KDH/WKDH dan Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-tamu Pimpinan	350 kali	350 kali	350 kali Liputan	2,000,000,000	2,182,043,386	350 kali	350 kali Liputan	2,000,000,000	1,693,057,002	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01,4.01.03.56.12	7	Kegiatan Pembuatan dan Penayangan Video Profil	Jumlah Video	1 Video	1 Video	1 Video	1,000,000,000	877,497,800	1 Video	1 Video	1,500,000,000	456,975,393	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01,4.01.03.56.14	8	Kegiatan Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	Jumlah Buku PPI, Kunker dan Pidato Gubernur	3 Jenis buku	3 Jenis buku	3 Jenis buku	296,000,000	282,284,878	3 Jenis buku	3 Jenis buku	680,900,000	578,516,250	Biro Humas dan Protokol	Palembang
		4.01,4.01.03.56.16	9	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu SKPD	Jumlah Kelembagaan PPID	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	200,000,000	155,396,082	5 Jenis	1 Paket	350,000,000	71,592,202	Biro Humas dan Protokol	Palembang

Tabel T-C.27

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatnya Tatakelelahan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	4 01			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
		4 01	4 01	06 01	SEKRETARIAT DAERAH												
		4 01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (Buatkan indikator program)												
		4 01	01	1 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	300,000,000	100%	340,000,000	100%	495,000,000	100%	1,135,000,000		
		4 01	01	1 01	Sub kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	4 Orang	4 Orang	100,000,000	4 Orang	110,000,000	4 Laporan	121,000,000	4 Laporan	121,000,000	Biro Kersa	Palembang
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK SAKIP	-		0	0	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Kantor OPD
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0	2 Dok.	10,000,000	2 Dok	15,000,000	100%	25,000,000	Biro Organisasi	Kantor OPD
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	30,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 buku	20 buku	30,000,000	20 buku	35,000,000	20 buku	35,000,000	20 buku	35,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	20 buku	20 buku	30,000,000	20 buku	35,000,000	20 buku	35,000,000	20 buku	35,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	20 buku	20 buku	30,000,000	20 buku	35,000,000	20 buku	35,000,000	20 buku	35,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 buku	20 buku	30,000,000	20 buku	35,000,000	20 buku	35,000,000	20 buku	35,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen	50,000,000	10 dokumen	50,000,000	10 dokumen	50,000,000	10 dokumen	50,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4 01	01	1 01	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	105,000,000	4 dokumen	110,000,000	4 dokumen	110,000,000	4 dokumen	110,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4 01	01	1 01	Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Orang	8 Orang	0	8 Orang	150,000,000	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	200,000,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD
		4 01	01	1 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	60,877,504,000	100%	68,471,269,650	100%	68,884,710,000	100%	69,561,590,000		
		4 01	01	1 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium KPA selama 12 (dua belas) bulan	0	0	-	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	114,480,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4 01	01	1 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium PPTK selama 12 (dua belas) bulan	0	0	-	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	5 (lima) Orang PPTK	199,200,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4 01	01	1 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 KPA, 6 PPTK	-	-	1 KPA, 6 PPTK	96,360,000	1 KPA, 6 PPTK	96,360,000	2 KPA, 12 PPTK	192,720,000	Biro Hukum	Palembang
		4 01	01	1 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	---	---	0	6 orang	171,720,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	188,892,000	Biro Kesra	OPD
		4 01	01	1 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Honor KPA dan PPTK	-	-	-	1 tahun	147,000,000	1 tahun	161,700,000	100%	308,700,000	Biro Perekonomian	OPD

							ASN														
		4	01	01	1	02	02	6	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honor KPA dan Honor PPTK	-	-	-	1 KPA dan 6 PPTK	110,760,000	1 KPA dan 6 PPTK	110,760,000	Biro Administrasi Pembangunan	OPD		
		4	01	01	1	02	02	7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium yang dibayarkan	-	-	-	1 tahun	100,000,000	1 tahun	200,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	OPD		
		4	01	01	1	02	02	8	Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	0	1 Dokumen	176,680,000	1 Dokumen	200,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD		
		4	01	01	1	02	01	9	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1Tahun	1Tahun	57,394,164,000	1 Tahun	66,652,838,000	1 Tahun	66,652,838,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD		
		4	01	01	1	02	02	10	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 Orang	33 Orang	113,340,000	1Tahun	859,071,650	1Tahun	900,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD		
		4	01	01	1	02	02	11	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	8 Orang	8 Orang	-	8 Orang	217,320,000	1 Dokumen	217,320,000	Biro Humas dan Protokol	OPD		
		4	01	01	1	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Percentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	1,685,000,000	100%	1,690,000,000	100%	2,665,000,000	100%	2,665,000,000			
		4	01	01	1	0	02	2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	6 Unit	975,000,000	6 Unit	975,000,000	Biro Organisasi	OPD
		4	01	01	1	0	02	1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	R4 = 85 unit, Gedung = 21 unit	R4 = 85 unit, Gedung = 21 unit	1,500,000,000	R4 = 85 unit, Gedung = 21 unit	1,500,000,000	R4 = 85 unit, Gedung = 21 unit	1,500,000,000	R4 = 85 unit, Gedung = 21 unit	1,500,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	03	05	2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	110,000,000	2 laporan	110,000,000	2 laporan	110,000,000	2 laporan	110,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	03	06	3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	75,000,000	1 laporan	80,000,000	1 laporan	80,000,000	1 laporan	80,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Percentase Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur yang Terlaksana	100%	100%	4,584,509,000	100%	3,372,026,000	100%	2,015,777,600	100%	9,972,312,600			
		4	01	01	1	05	09	1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya	0	0	-	1 (satu) Orang	35,000,000	3 (tiga) Orang	105,000,000	4 (empat) Orang	140,000,000	Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4	01	01	1	05	02	2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaihan Khusus Hari-hari Tertentu yang tersedia	70 Stel	70 Stel	70,000,000	-	-	-	-	70 Stel	70,000,000	Biro Hukum	Palembang
		4	01	01	1	05	09	3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	3 Orang	58,014,000	-	-	-	-	3 Orang	58,014,000	Biro Hukum	Palembang
		4	01	01	1	05	11	4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	-	-	3 Orang	60,000,000	1 orang	25,000,000	3 Orang	85,000,000	Biro Hukum	Palembang
		4	01	01	1	05	09	5	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	112,360,000	3 Orang	72,616,000	3 Orang	79,877,600	3 Orang	79,877,600	Biro Kesra	OPD
		4	01	01	1	05	02	6	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu (pakaian olahraga senam pagi)	100%	30 Orang	30,000,000	30 Orang	70,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	250,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Kantor OPD (Biro Adm. Pembangunan)
		4	01	01	1	05	09	7	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	100%	2 Orang	45,000,000	3 Orang	103,510,000	3 Orang	150,000,000	3 Orang	298,510,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah
		4	01	01	1	05	11	8	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	100%	4 Orang	42,585,000	4 Orang	100,000,000	4 Orang	320,000,000	4 Orang	462,585,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah
		4	01	01	1	05	09	9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang ikut pelatihan kepemimpinan	-	15 orang	306,627,000	15 orang	225,000,000	15 orang	200,000,000	15 orang	731,627,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang

		4	01	01	1	05	10	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah seminar, pelatihan yang diikuti	-	20 kali	143,373,000	20 kali	250,000,000	20 kali	100,000,000	20 kali	493,373,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang
		4	01	01	1	05	03	11	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 org	9 Biro	140,000,000	9 Biro	120,000,000	9 Biro	150,000,000	100%	410,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	01	1	05	09	12	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 org	1 org	32,000,000	5 org	100,000,000	9 Org	150,000,000	100%	282,000,000	Biro organisasi	Dalam Daerah, Luar Daerah
		4	01	01	1	05	02	13	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 stel @ 836 orang	3 stel @ 836 orang	3,418,650,000	1 stel @ 836 orang	1,650,000,000	-	-	-	5,068,650,000	Biro Umum dan Perelkapan	OPD
		4	01	01	1	05	09	14	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	8 orang	85,900,000	8 orang	185,900,000	8 orang	185,900,000	8 orang	457,700,000	Biro Umum dan Perelkapan	OPD
		4	01	01	1	05	10	15	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4 orang	4 orang	50,000,000	20Kali	150,000,000	20Kali	150,000,000	20Kali	350,000,000	Biro Umum dan Perelkapan	OPD
		4	01	01	1	05	11	16	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 orang	9 orang	50,000,000	30 Kali	250,000,000	30 Kali	250,000,000	30 Kali	550,000,000	Biro Umum dan Perelkapan	OPD
		4	01	01	1	05	02	17	Sub Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	90 Orang/2 Stel	90 Orang/2 Stel	443,236,000	90 Orang/2 Stel	640,000,000	120 Paket	600,000,000	120 Paket	5,175,000,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD
		4	01	01	1	05	09	18	Sub Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	4 Orang	92,846,000	4 Orang	125,000,000	4 Orang	150,000,000	4 Orang	150,000,000	Biro Human dan Protokol	Kantor OPD
		4	01	01	1	05	11	19	Sub Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	32 Orang	32 Orang	100,000,000	32 Orang	200,000,000	32 Orang	250,000,000	32 Orang	250,000,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD
		4	01	01	1	05	X	20	Sub Monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi dan Peningkatan Kinerja yang terlaksana	8 Orang	8 Orang	0	-	-	-	-	-	-	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD
		4	01	01	1	06			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase Administrasi Perkantoran yang terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>22,435,552,000</b>	<b>100%</b>	<b>37,955,922,000</b>	<b>100%</b>	<b>38,460,462,000</b>	<b>100%</b>	<b>98,851,936,000</b>		
		4	01	01	1	06	02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	0	32 Item	19,750,000	32 Item	19,280,000	32 Item	19,750,000	0	58,780,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4	01	01	1	06	02	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komputer, Printer, Laptop dan Air Conditioner (AC) Yang Tersedia	0	6 (enam) unit komputer, 6 (enam) unit printer, 6 (enam) unit laptop serta 6 (enam) unit Ac 1 PK	200,000,000	10 (sepuluh) unit komputer, 10 (sepuluh) unit printer, 10 (sepuluh) unit laptop serta 10 (sepuluh) unit Ac 1 PK	386,840,000	6 (enam) unit komputer, 6 (enam) unit printer, 6 (enam) unit laptop serta 6 (enam) unit Ac 1 PK	200,000,000	22 unit komputer, 22 unit printer, 22 unit laptop serta 22 unit Ac 1 PK	786,840,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4	01	01	1	06	09	3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	20 Kali	80 Kali	329,500,000	80 Kali	500,000,000	80 Kali	500,000,000	240 Kali	1,329,500,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
		4	01	01	1	06	02	4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	26 Item	26 Item	18,000,000	26 Item	12,000,000	30 Item	20,000,000	55 Item	50,000,000	Biro Hukum	Palembang
		4	01	01	1	06	02	5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Unit	13 Unit	123,500,000	7 Unit	90,000,000	8 Unit	110,000,000	28 Unit	323,500,000	Biro Hukum	Palembang
		4	01	01	1	06	09	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	30 Kali	30 Kali	330,000,000	15 Kali	100,000,000	25 Kali	150,000,000	70 Kali	580,000,000	Biro Hukum	Palembang
		4	01	01	1	06	02	7	Sub Kegiatan :Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	---	---	0	---	0	10 Paket	60,000,000	10 Paket	60,000,000	Biro Kesra	Palembang
		4	01	01	1	06	09	8	Sub Kegiatan :Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	120 Kali	491,610,000	150 kali	609,060,000	150 Laporan	760,000,000	150 Laporan	760,000,000	Biro Kesra	Palembang
		4	01	01	1	06	05	9	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	-	-	-	-	-	8 Paket	38,686,500	6 Paket	38,686,500	Biro Kesra	Palembang

		4	01	01	1	06	02	9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	-	15 jenis	37,650,000	5 jenis	100,000,000	5 jenis	110,000,000	100%	247,650,000	Biro Perekonomian	OPD	
		4	01	01	1	06	09	10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Keluar Daerah dan Luar Negeri	23 kali	86 kali	390,000,000	90 kali	270,000,000	90 kali	297,000,000	100%	957,000,000	Biro Perekonomian	OPD	
		4	01	01	1	06	02	11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor untuk kelancaran kegiatan Administrasi Perkantoran	100%	20 Jenis	70,000,000	54 Jenis	70,000,000	1 Kegiatan	188,510,000	1 Kegiatan	328,510,000	Biro Administrasi Pembangunan	Kantor OPD (Biro Adm. Pembangunan)	
		4	01	01	1	06	09	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	100%	1 Dokumen	270,000,000	1 Dokumen	320,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	940,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah	
		4	01	01	1	06	02	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK di Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	1 tahun	10,000,000	1 tahun	800,000,000	1 tahun	1,000,000,000	1 tahun	1,810,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang	
		4	01	01	1	06	04	14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat/kegiatan	-	4 kali	100,000,000	4 kali	40,000,000	4 kali	50,000,000	4 kali	190,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang	
		4	01	01	1	06	05	15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan di lingkungan setda	-	1 tahun	10,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	110,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang	
		4	01	01	1	06	09	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	-	40 kali	315,300,000	40 kali	300,000,000	40 kali	300,000,000	40 kali	915,300,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang	
		4	01	01	1	06	02	17	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	3 paket	135,000,000	3 paket	20,000,000	-	-	-	100%	155,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	01	1	06	09	18	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	250,000,000	45 Laporan	300,000,000	45 Laporan	450,000,000	100%	1,000,000,000	Biro organisasi	Dalam Daerah, Luar Daerah	
		4	01	01	1	06	09	19	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	78,460,000	2 Paket	78,460,000	Biro organisasi	Kantor OPD	
		4	01	01	1	06	09	20	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	9 Unit	138,000,000	9 Unit	138,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD	
		4	01	01	1	06	01	19	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	26 aset bangunan dan gedung kantor	26 aset bangunan dan gedung kantor	1,300,000,000	26 aset bangunan dan gedung kantor	1,300,000,000	26 aset bangunan dan gedung kantor	1,000,000,000	26 aset bangunan dan gedung kantor	3,600,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	06	04	20	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 tahun	1 tahun	1,300,000,000	1 tahun	6,650,000,000	1 tahun	6,650,000,000	1 tahun	14,600,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	06	05	21	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	175 dokumen	175 dokumen	700,000,000	175 dokumen	500,000,000	-	-	-	-	1,200,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	06	08	22	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	400 unit; 1500 kali acara	400 unit; 1500 kali acara	9,785,242,000	400 unit; 1500 kali acara	15,318,742,000	400 unit; 1500 kali acara	15,318,742,000	400 unit; 1500 kali acara	40,422,726,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	06	09	23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2500 kali (dalam dan luar daerah)	2500 kali (dalam dan luar daerah)	6,050,000,000	2500 kali (dalam dan luar daerah)	10,000,000,000	2500 kali (dalam dan luar daerah)	10,500,000,000	2500 kali (dalam dan luar daerah)	26,550,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	06	10	24	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 arsip	2000 arsip	200,000,000	2000 arsip	200,000,000	2000 arsip	200,000,000	2000 arsip	600,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	06	02	25	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	50,000,000	30 Jenis	60,000,000	1 Paket	85,000,000	1 Paket	85,000,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD	
		4	01	01	1	06	06	26	Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	250 Langganan	250 Langganan	1,545,000,000	250 Langganan	2,412,080,000	1 Dokumen	2,500,000,000	1 Dokumen	3,000,000,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD	

		4	01	01	1	06	09	27	Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	10 Kali Kegiatan	10 Kali Kegiatan	180,000,000	15 Kali Kegiatan	500,000,000	1 Laporan	600,000,000	1 Laporan	650,000,000	Biro Humas dan Protokol	Dalam Daerah, Luar Daerah	
		4	01	01	1	07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	88,007,776,350	100%	87,145,833,350	100%	86,196,446,350	100%	261,350,056,050			
		4	01	01	1	07	02	1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang tersedia	0	1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan Mitsubishi Xpander Cross A/T	300,000,000	0	-	0	-	1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan Mitsubishi Xpander Cross A/T	300,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
											0	-	-	5 (lima) Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan (motor) Yamaha Aerox 155 VVA S-Version	150,000,000	0	-	5 (lima) Unit Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan (motor) Yamaha Aerox 155 VVA S-Version	150,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
											0	-	-	3 (tiga) Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan (Kawasaki KLX 150 BF)	105,000,000	0	-	3 (tiga) Unit Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan (Kawasaki KLX 150 BF)	105,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
		4	01	01	1	07	08	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Pemeliharaan Hardware/Softwre Milik Daerah yang dipelihara	1 Keg	1 Keg	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	Biro Hukum	Palembang
		4	01	01	1	07	02	3	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	1 Unit	1 Unit	580,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	3 Unit	1,080,000,000	Biro Hukum	Palembang	
		4	01	01	1	07	02	4	Sub Kegiatan :Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	698,500,000	4 jenis	768,350,000	4 unit	700,000,000	4 unit	70,000,000	Biro Kesra	OPD	
		4	01	01	1	07	10	5	Sub Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	167,850,000	8 Jenis	235,615,000	15 unit	250,000,000	15 unit	250,000,000	Biro Kesra	OPD	
		4	01	01	1	07	02	6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang tersedia	-	4 buah	1,417,800,000	-	-	-	-	100%	1,417,800,000	Biro Perekonomian	OPD	
		4	01	01	1	07	08	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	-	6 jenis	373,850,000	6 jenis	150,000,000	6 jenis	165,000,000	100%	688,850,000	Biro Perekonomian	OPD	
		4	01	01	1	07	02	8	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional yang dianggaran	100%	1 Unit	613,450,000	-	-	-	-	-	613,450,000	Biro Administrasi Pembangunan	Palembang	
		4	01	01	1	07	06	9	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Prasarana Perkantoran yang tersedia	100%	20 Unit	150,000,000	4 Unit	75,000,000	15 Unit	250,000,000	39 Unit	475,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Palembang	
		4	01	01	1	07	08	10	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Sistem Aplikasi yang Tersedia	100%	1 Sistem	178,235,000	-	-	1 Sistem	200,000,000	1 Sitem	378,235,000	Biro Administrasi Pembangunan	Palembang	
		4	01	01	1	07	02	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas untuk operasional	-	13 unit	-	13 unit	1,000,000,000	13 unit	300,000,000	13 unit	1,300,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang	
		4	01	01	1	07	08	12	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang tersedia	1 Aplikasi	1 Aplikasi	60,000,000	3 Aplikasi	300,000,000	1 Aplikasi	200,000,000	100%	560,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD	

		4	01	01	1	07	02	13	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	R4 = 22 unit, R2 = 12 unit	R4 = 22 unit, R2 = 12 unit	10,055,750,000	R4 = 22 unit, R2 = 12 unit	10,055,750,000	R4 = 22 unit, R2 = 12 unit	11,055,750,000	R4 = 22 unit, R2 = 12 unit	31,167,250,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	07	03	14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	0	0	-	1 unit	550,000,000	1 unit	550,000,000	1 unit	1,100,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	07	05	15	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	60 jenis	60 jenis	7,870,000,000	50 jenis	2,200,000,000	150 jenis	2,300,000,000	150 jenis	12,370,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	07	10	16	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	180 jenis	180 jenis	15,052,000,000	150 jenis	12,052,000,000	150 jenis	10,052,000,000	150 jenis	37,156,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	07	06	17	Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disesuaikan	10 Jenis	10 Jenis	450,000,000	20 Jenis	1,200,000,000	10 Unit	1,300,000,000	10 Unit	1,300,000,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD	
		4	01	01	1	08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terepenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100%	100%	46,271,101,350	100%	53,908,508,350	100%	54,143,297,350	100%	154,322,907,050			
		4	01	01	1	08	04	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Tenaga Administrasi Pelayanan Umum Kantor	20 Orang	25 Orang	750,750,000	29 Orang	808,470,000	29 Orang	808,470,000	29 Orang	2,367,690,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
		4	01	01	1	08	04	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Tenaga Administrasi Pelayanan Umum Kantor	32 Orang	32 Orang	578,760,000	32 Orang	754,260,000	32 Orang	851,760,000	96 Orang	2,184,780,000	Biro Hukum	Palembang	
		4	01	01	1	08	04	3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18 orang dan 5 orang TKPD	18 orang dan 5 orang TKPD	682,890,000	18 orang dan 5 orang TKPD	682,890,000	19 Laporan Honorer dan 5 Laporan TKPD	716,820,000	19 Laporan Honorer dan 5 Laporan TKPD	716,820,000		Biro Kesra	OPD
		4	01	01	1	08	04	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	3 Orang	10 orang	241,800,000	10 orang	241,800,000	10 orang	241,800,000	100%	725,400,000	Biro Perekonomian	OPD	
		4	01	01	1	08	04	5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pendukung Administrasi Teknis Perkantoran dan Jumlah Jasa TKPD pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	100%	6 Orang Honorer dan 5 Orang TKPD	275,730,000	6 Orang Honorer dan 5 Orang TKPD	275,730,000	6 Orang Honorer dan 5 Orang TKPD	275,730,000	6 Orang Honorer dan 5 Orang TKPD	827,190,000	Biro Administrasi Pembangunan	Palembang	
		4	01	01	1	08	04	6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	.	-	1 tahun	710,000,000	1 tahun	831,000,000	1 tahun	900,000,000	1 tahun	2,441,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang	
		4	01	01	1	08	04	8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 org	17 org	479,310,000	22 org	551,460,000	22 org	551,460,000	1	1,582,230,000	Biro organisasi	Kantor OPD	
		4	01	01	1	08	01	9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150 surat	4.150 surat	136,000,000	4.150 surat	136,000,000	4.150 surat	136,000,000	4.150 surat	408,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	08	02	10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	26 aset bangunan dan gedung kantor	26 aset bangunan dan gedung kantor	8,200,000,000	26 aset bangunan dan gedung kantor	8,200,000,000	26 aset bangunan dan gedung kantor	8,200,000,000	26 aset bangunan dan gedung kantor	24,600,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	08	03	11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1500 acara	1500 acara	21,698,963,000	15.000 acara	27,160,000,000	15.000 acara	27,160,000,000	15.000 acara	76,018,963,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	08	04	12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	7 bangunan	7 bangunan	12,516,898,350	7 bangunan	14,266,898,350	7 bangunan	14,266,898,350	7 bangunan	41,050,695,050	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD	
		4	01	01	1	08	04	13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	8.000 materai	8.000 materai	48,000,000	8.000 materai	80,000,000	1 Laporan	90,000,000	1 Laporan	90,000,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD	
		4	01	01	1	08	04	14	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	45 Orang	45 Orang	1,232,850,000	51 Orang	1,551,600,000	1 Laporan	1,551,600,000	1 Laporan	1,624,100,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD	
		4	01	01	1	09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpelihara	100%	100%	64,774,305,252	100%	56,834,613,000	100%	31,856,613,000	100%	153,468,531,252			
		4	01	01	1	09	01	9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	Biro organisasi	Kantor OPD	

		4	01	01	1	09	01	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	2 unit	500,000,000	2 unit	1,300,000,000	2 unit	1,300,000,000	2 unit	3,100,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	09	02	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	200 Unit	200 Unit	9,200,000,000	200 unit	7,984,613,000	200 unit	7,984,613,000	200 unit	25,169,226,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	09	05	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dipelihara	50 Jenis	50 Jenis	600,000,000	50 jenis	800,000,000	50 jenis	800,000,000	50 jenis	2,200,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	09	09	4	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	52,327,221,252	100%	45,000,000,000	100%	20,000,000,000	100%	117,327,221,252	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	09	10	5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	2,147,084,000	100%	1,750,000,000	100%	1,750,000,000	100%	5,647,084,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	09	06	6	Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	50,000,000	20 Jenis	200,000,000	10 Jenis	250,000,000	10 Unit	300,000,000	Biro Humas dan Protokol	Kantor OPD
		4	01	03					Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah											
		4	01	03	1	01			Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang Dilaksanakan	100%	100%	1,175,000,000	100%	1,869,320,000	100%	1,869,320,000	100%	4,913,640,000		
		4	01	03	1	01	02	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Prosentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum yang di Fasilitasi										Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
									Jumlah Kecamatan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	34 Kec	75 Kecamatan	100,000,000	75 Kecamatan	461,580,000	75 Kecamatan	461,580,000	225 Kecamatan	1,023,160,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	0	1 (satu) Laporan	150,000,000	1 (satu) Laporan	130,000,000	1 (satu) Laporan	130,000,000	3 (tiga) Laporan	410,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
									Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Laporan	1 (satu) Laporan	100,000,000	1 (satu) Laporan	252,740,000	1 (satu) Laporan	252,740,000	3 (tiga) Laporan	605,480,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
		4	01	03	1	01	03	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Prosentase Penataan Daerah yang difasilitasi dan dilaksanakan										Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
									Jumlah Pembentukan Pemekaran Kecamatan yg di fasilitasi	6 Kec	3 Kecamatan	100,000,000	3 Kecamatan	75,000,000	3 Kecamatan	75,000,000	9 Kecamatan	250,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
									Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah yang difasilitasi	10 Batas Bermasalah, 10 Pelacakan Batas, 3 Batas Provinsi dan Rekonstruksi Batas	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	400,000,000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	400,000,000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	400,000,000	15 Batas Bermasalah , 15 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	1,200,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
									Jumlah Lokasi Penamaan Rupa Bumi yang teridentifikasi	3 Lokasi	3 Lokasi	125,000,000	3 Lokasi	300,000,000	3 Lokasi	300,000,000	9 Lokasi	725,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
									Jumlah Pilar Permanen yang terpasang	20 Pilar	10 Pilar	200,000,000	10 Pilar	250,000,000	10 Pilar	250,000,000	30 Pilar	700,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
		4	01	03	1	02			Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Difasilitasi	100%	100%	1,750,000,000	100%	1,225,000,000	100%	1,125,000,000	100%	4,100,000,000		
		4	01	03	1	02	01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	Prosentase Administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang di Fasilitasi											
									Jumlah Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terverifikasi	65 Dok	30 Dokumen	150,000,000	40 Dokumen	200,000,000	45 Dokumen	200,000,000	115 Dokumen	550,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	

							Jumlah Kunjungan Kerja DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	40 Kali	35 Kali	150,000,000	50 kali	150,000,000	55 kali	150,000,000	140 kali	450,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang		
							Jumlah Izin yang diterbitkan	37 Surat	30 Surat Izin	100,000,000	40 Surat Izin	150,000,000	45 Surat Izin	150,000,000	115 Surat Izin	400,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang		
							Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	8 KDH/ WKDH	7 KDH/ WKDH	900,000,000	1 (satu) Penjabat Bupati MUBA	100,000,000	0	-	0	1,000,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang		
	4	01	03	1	02	03	2	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan								Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang		
								Jumlah Dokumen RLPPD Prov. Sumsel	10 Buku	55 Buku	50,000,000	55 Buku	75,000,000	55 Buku	75,000,000	165 Buku	200,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
								Jumlah Dokumen LPPD Prov. Sumsel	0	2 Dokumen (120 buku)	100,000,000	2 Dokumen (120 buku)	150,000,000	2 Dokumen (120 buku)	150,000,000	6 Dokumen (360 buku)	400,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
								Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran	3 buku	3 dokumen	200,000,000	3 dokumen	250,000,000	3 dokumen	250,000,000	9 dokumen	700,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
								Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota	0	1 (satu) Laporan	100,000,000	1 (satu) Laporan	150,000,000	1 (satu) Laporan	150,000,000	3 (tiga) Laporan	400,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
	4	01	03	1	03	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>Prosentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>500,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>600,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,500,000,000</b>			
	4	01	03	1	03	01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Partisipasi Aktif dalam APPSI tahun 2022	6 Kali Rapat/ Pertemuan	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	250,000,000	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	200,000,000	6 Kali Rapat/Pertemuan APPSI	300,000,000	18 Kali Rapat/ Pertemuan APPSI	750,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang
								Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	18 MoU	30 Dokumen	150,000,000	40 Dokumen	300,000,000	45 Dokumen	300,000,000	115 Dokumen	750,000,000	Biro Pemerintahan dan OTDA	Palembang	
	4	01	05			<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Percentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku</b>												
	4	01	05	1	01	<b>Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan</b>		<b>Percentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,026,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,115,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,145,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,286,000,000</b>			
	4	01	05	1	01	01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Penerbitan Peraturan Daerah (PERDA)	7 Perda	7 Perda	310,000,000	7 Perda	310,000,000	7 Perda	320,000,000	21 Perda	940,000,000	Biro Hukum	Palembang
								Jumlah Penerbitan Peraturan Gubernur (PERGUB)	27 Pergub	27 Pergub	160,000,000	27 Pergub	180,000,000	27 Pergub	180,000,000	81 Pergub	520,000,000	Biro Hukum	Palembang	
	4	01	05	1	01	02	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penerbitan	Jumlah Penelaahan Draft Keputusan Gubernur Sumsel yang ditetapkan	780 Keputusan Gubernur	780 Keputusan Gubernur	80,000,000	780 Kep.Gubernur	80,000,000	780 Kep. Gubernur	90,000,000	2340 Kep.Gubernur	250,000,000	Biro Hukum	Palembang
	4	01	05	1	01	03	3	Sub Kegiatan Pendokumentasiian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Koleksi dan tersosialisasiya Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah	200 Buku	200 Buku	51,000,000	180 Buku	50,000,000	180 Buku	50,000,000	560 Buku	151,000,000	Biro Hukum	Palembang
								Jumlah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	3 Perda/Pergub	3 Perda/Pergub	45,000,000	1 Perda/Pergub	25,000,000	1 Perda/ Pergub	25,000,000	5 Perda/Pergub	95,000,000	Biro Hukum	Palembang	
								Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/Monitoring dan Produk Hukum Provinsi yang di updating/upload ke Website	110 Produk Hukum	110 Produk Hukum	110,000,000	80 Produk Hukum	75,000,000	80 produk hukum	80,000,000	270 Produk Hukum	265,000,000	Biro Hukum	Palembang	
	4	01	05	1	01	04	4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk hukum kab/Kota yang dapat dievaluasi,Fasilitasi dan Klarifikasi	170 Perda Kab/kota, 340 Perbup/Perwali	170 Perda Kab/kota, 340 Perbup/Perwali	270,000,000	170 Perda Kab/Kota, 340 Perbup/Perwali	320,000,000	170 Perda Kab/Kota, 340 Perbup/Perwali	320,000,000	510 Perda Kab/Kota, 1020 Perbup/Perwali	910,000,000	Biro Hukum	Palembang
								Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/kota	1 Kali	-	-	1 Kali	75,000,000	1 Kali	80,000,000	2 Kali	155,000,000	Biro Hukum	Palembang	
	4	01	05	1	02	<b>Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Bantuan Hukum</b>		<b>Percentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,165,726,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,422,380,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,482,380,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,070,486,000</b>			

		4	01	05	1	02	01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Perkara yang menyangkut Kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	8 Perkara	8 Perkara	635,000,000	8 Perkara	602,380,000	9 Perkara	622,380,000	25 Perkara	1,859,760,000	Biro Hukum	Palembang
									Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin	6 Kasus	6 Kasus	-	76 Kasus	500,000,000	77 Kasus	500,000,000	159 Kasus	1,000,000,000	Biro Hukum	Palembang	
									Jumlah Rapat dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang diselesaikan	4 Kali	4 Kali	175,726,000	2 Kali	50,000,000	3 Kali	65,000,000	9 Kali	290,726,000	Biro Hukum	Palembang	
									Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kab/Kota	1 Kali	1 Kali	80,000,000	-	-			1 Kali	80,000,000	Biro Hukum	Palembang	
		4	01	05	1	02	02	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Hukum	250 Orang/ 5 Kab/kota	250 Orang/ 5 Kab/kota	190,000,000	250 Orang/ 5 Kab,Kota	210,000,000	250 Orang/ 5 Kab,Kota	220,000,000	750 Orang/ 15 Kab,Kota	620,000,000	Biro Hukum	Palembang
									Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota	4 Laporan	4 Laporan	85,000,000	4 Laporan	60,000,000	4 Laporan	75,000,000	12 Laporan	220,000,000	Biro Hukum	Palembang	
		4	01	04					Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti											
		4	01	04	1	01			Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual yang ditindaklanjuti	100%	100%	48,447,086,300	100%	52,295,074,930	100%	57,074,582,423	100%	157,816,743,653		
		4	01	05	1	01	01	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang difasilitasi	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	30,025,062,300	17 Kab/Kota	33,027,568,530	25 unit	35,880,325,383	25 unit	35,880,325,383	Biro Kesra	OPD
		4	01	05	1	01	02	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembangan Bina Spiritual	Jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	18,422,024,000	1 Dokumen	19,267,506,400	10 lembaga	21,194,257,040	10 lembaga	21,194,257,040	Biro Kesra	OPD
		4	01	04	1	03			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	261,000,000	100%	287,100,000	100%	615,810,000	100%	1,163,910,000		
		4	01	05	1	03	01	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependidikan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah dokumentasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	300 orang	300 orang	261,000,000	300 orang	287,100,000	1 Dokumen	315,810,000	1 dokumen	315,810,000	Biro Kesra	OPD
		4	01	05	1	03	02	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	---	---	-	---	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	Biro Kesra	OPD
		4	01	05	1	03	03	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	---	---	-	---	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	Biro Kesra	OPD
		4	01	04	1	02			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100%	100%	785,187,700	100%	863,706,470	100%	1,100,077,117	100%	2,748,971,287		
		4	01	05	1	02	02	1	Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi,Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	387,450,000.00	1 dokumen	426,195,000.00	1 Dokumen	468,814,500	1 Dokumen	468,814,500	Biro Kesra	OPD
		4	01	05	1	02	03	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 dokumen	1 dokumen	397,737,700.00	1 dokumen	437,511,470.00	1 Dokumen	481,262,617	1 Dokumen	481,262,617	Biro Kesra	OPD
		4	01	05	1	02	04	3	Sub Kegiatan Fasilitasi,Koordinasi,Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Koordinasi,Sinkronisasi, evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	---	---	-	---	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	Biro Kesra	OPD
		4	01	03					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam yang difasilitasi											

	4	01	03	1	01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia	100%	100%	948,900,000	100%	1,100,000,000	100%	1,210,000,000	100%	3,258,900,000				
	4	01	03	1	01	01	1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Data Percepatan Akses Keuangan Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan, dan Pelaksanaan CSR PKBL Untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sumatera Selatan	-	10 Buku, 35 Buku	678,400,000	20 Buku Laporan	700,000,000	20 Buku Laporan	770,000,000	100%	2,148,400,000	Biro Perekonomian	OPD
	4	01	03	1	01	02	2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Data Penyaluran KUR oleh Bank Penyalur kepada UMKM	-	10 Buku	270,500,000	5 Buku Laporan	400,000,000	5 Buku Laporan	440,000,000	100%	1,110,500,000	Biro Perekonomian	OPD
	4	01	03	1	01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang Tersedia	100%	100%	404,694,400	100%	950,000,000	100%	1,045,000,000	100%	2,399,694,400			
	4	01	03	1	01	03	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pengembangan Investasi Promosi Produk dan Budaya Sumatera Selatan	-	2 Pameran	404,694,400	1 Pameran	600,000,000	1 Pameran	660,000,000	100%	1,664,694,400	Biro Perekonomian	OPD
	4	01	03	1	01	05	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Data Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	1 Buku Laporan	350,000,000	1 Buku Laporan	385,000,000	100%	735,000,000	Biro Perekonomian	OPD
	4	01	03	1	01	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	100%	100%	1,185,305,600	100%	1,291,200,000	100%	1,420,320,000	100%	3,896,825,600			
	4	01	03	1	01	08	1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Data Perkembangan 15 BUMD di Sumatera Selatan, dan Informasi tentang BLUD, dan Jumlah Raperta BUMD	-	17 Buku dan 2 Raperda	1,185,305,600	10 Buku Laporan, 1 Raperda	1,291,200,000	10 Buku Laporan, 1 Raperda	1,420,320,000	100%	3,896,825,600	Biro Perekonomian	OPD
	4	01	08	1		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan												
	4	01	08	1	01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	650,000,000	100%	575,000,000	100%	910,000,000	100%	2,135,000,000			
	4	01	08	1	01	01	1	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Provinsi.	100%	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	310,000,000	1 Dokumen	760,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah
	4	01	08	1	01	02	2	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBN	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBN.	100%	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	290,000,000	1 Dokumen	590,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah
	4	01	08	1	01	03	3	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota.	100%	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	225,000,000	1 Dokumen	310,000,000	1 Dokumen	785,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah
	4	01	08	1	02	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Persentase peningkatan aparatur dalam pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	100%	100%	275,000,000	100%	375,000,000	100%	690,000,000	100%	1,340,000,000			
	4	01	08	1	02	01	1	Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.	100%	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	455,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah
	4	01	08	1	02	02	2	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	100%	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	430,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah
	4	01	08	1	02	03	3	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah.	100%	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	455,000,000	Biro Administrasi Pembangunan	Dalam Daerah, Luar Daerah
	4	01	07			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa		Persentase Kebijakan dan Pengadaan Barang dan Jasa												
	4	01	07	1	01	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	3,728,975,000	100%	5,104,000,000	100%	5,500,000,000	100%	14,332,975,000			
	4	01	07	1	01	02	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Barang Yang dikelola di E-Katalok Lokal, Jumlah paket pengadaan yang terpantau, persentase koordinasi pengadaan yang dilaksanakan	-	5 jenis katalog, 600 paket, 100 persen	3,711,475,000	5 jenis katalog, 600 paket, 100 persen	4,754,000,000	5 jenis katalog, 600 paket, 100 persen	5,000,000,000	5 jenis katalog, 600 paket, 100 persen	13,465,475,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang
	4	01	07	1	01	03	2	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Rakor LPSE yang dilaksanakan, Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Monev	-	100 orang, 17 kab/kota	17,500,000	100 orang, 17 kab/kota	350,000,000	100 orang, 17 kab/kota	500,000,000	100 orang, 17 kab/kota	867,500,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang

		4	01	07	1	02		<b>Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>Percentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	100%	100%	<b>200,000,000</b>	100%	<b>300,000,000</b>	100%	<b>225,000,000</b>	100%	<b>725,000,000</b>			
		4	01	07	1	02	02	1	Sub Kegiatan	Jumlah Rak yang disewa, Jumlah aplikasi website	-	1 tahun	200,000,000	1 tahun	300,000,000	1 tahun	225,000,000	1 tahun	725,000,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang
		4	01	01	1	03		<b>Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Percentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	100%	100%	<b>461,600,000</b>	100%	<b>1,000,000,000</b>	100%	<b>1,450,000,000</b>	100%	<b>2,911,600,000</b>			
		4	01	07	1	03	01	1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Bintek PBJ yang diadakan, Jumlah peserta Bintek SPSE yang diadakan, jumlah pejabat fungsional	-	100 orang, 20 orang pejabat fungsional	232,500,000	100 orang, 20 orang pejabat fungsional	800,000,000	100 orang, 20 orang pejabat fungsional	1,000,000,000	100 orang, 20 orang pejabat fungsional	2,032,500,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang
		4	01	07	1	03	02	2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kab/Kota yang dibina	-	17 kab/kota	172,600,000	-	-	17 kab/kota	200,000,000	17 kab/kota	372,600,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang
		4	01	07	1	03	03	3	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah kegiatan pendampingan yang dilaksanakan	-	-	56,500,000	-	200,000,000	-	250,000,000	-	506,500,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Palembang
		4	01	04				<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>Percentase Penataan Organisasi</b>												
		4	01	04	1	01		<b>Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>Terlaksanannya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	100%	100%	<b>328,000,000</b>	100%	<b>310,000,000</b>	100%	<b>750,000,000</b>	100%	<b>1,388,000,000</b>			
		4	01	04	1	01	01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	2 dok	2 dok	100,000,000	2 dok	80,000,000	2 dok	250,000,000	6 dok	430,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	04	1	01	02	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	1 dok	1 dok	78,000,000	1 dok	80,000,000	1 dok	200,000,000	3 dok	358,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	04	1	02	03	3	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Penataan Analisis Jabatan	2 dok	2 dok	150,000,000	2 dok	150,000,000	2 dok	300,000,000	2 dok	600,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	01	1	01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>Percentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa</b>	100%	100%	<b>465,690,000</b>	100%	<b>491,860,000</b>	100%	<b>950,000,000</b>	100%	<b>1,907,550,000</b>			
		4	01	04	1	02	04	1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 dok	1 dok	10,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	150,000,000	3 dok	260,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	04	1	02	05	2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 dok	2 dok	130,000,000	2 dok	131,860,000	2 dok	200,000,000	6 dok	461,860,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	04	1	02	06	3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Dokumen evaluasi budaya kerja	1 dok	1 dok	80,000,000	1 dok	80,000,000	1 dok	150,000,000	3 dok	310,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	04	1	02	07	4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatajaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatajaksana Pemerintahan	2 dok	2 dok	105,000,000	2 dok	100,000,000	2 dok	250,000,000	2 dok	455,000,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	04	1	02	08	5	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	2 dok	2 dok	140,690,000	2 dok	80,000,000	2 dok	200,000,000	2 dok	420,690,000	Biro organisasi	Kantor OPD
		4	01	01	1	11		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Percentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	100%	100%	<b>8,989,662,000</b>	100%	<b>8,848,868,000</b>	100%	<b>8,848,868,000</b>	100%	<b>26,687,398,000</b>			
		4	01	01	1	11	01	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	2 Orang	2 Orang	258,004,000	2 orang	249,964,000	2 orang	249,964,000	2 orang	757,932,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	11	02	2	Sub Kegiatan Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	2 Orang	2 Orang	1,600,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	5,600,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	11	03	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up KDH dan WKDH	4 Orang	4 Orang	11,025,000	8 orang	11,025,000	8 orang	11,025,000	8 orang	33,075,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	11	04	4	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	2 Orang	2 Orang	7,120,633,000	2 orang	6,587,879,000	2 orang	6,587,879,000	2 orang	20,296,391,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD
		4	01	01	1	12		<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumataan Sekretariat Daerah</b>	<b>Percentase Capaian Peningkatan Kerumataan Sekretariat Daerah</b>	100%	100%	<b>95,350,768,000</b>	100%	<b>122,028,000,000</b>	100%	<b>125,750,000,000</b>	100%	<b>343,128,768,000</b>			
		4	01	01	1	12	01	1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	10,600,000,000	1 Tahun	8,600,000,000	1 Tahun	8,600,000,000	1 Tahun	27,800,000,000	Biro Umum dan Perelngkapan	OPD

		4	01	01	1	12	02	2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	2,250,000,000	1 Tahun	2,250,000,000	1 Tahun	2,250,000,000	1 Tahun	6,750,000,000	Biro Umum dan Perelkapan	OPD
		4	01	01	1	12	03	3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	1,600,000,000	1 Tahun	1,600,000,000	1 Tahun	1,600,000,000	1 Tahun	4,800,000,000	Biro Umum dan Perelkapan	OPD
		4	01	01	1	13		Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Percentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Komunikasi dan Informasi	100%	100%	33,510,901,000	100%	39,643,680,000	100%	41,000,000,000	100%	114,154,581,000			
		4	01	01	1	13	01	1	Sub Penyiapan Materi pimpinan	Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	300 Kali Kegiatan	300 Kali Kegiatan	3,769,000,000	300 Kali Kegiatan, 1.500 Buku, 1 Jenis	6,169,760,000	5 Dokumen	6,500,000,000	5 Dokumen	6,500,000,000	Biro Humas dan Protokol	Dalam Daerah, Luar Daerah
		4	01	01	1	13	02	2	Sub Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah peliputan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	8 Video	8 Video	1,100,000,000	150 Kali Peliputan	4,473,480,000	1 Laporan	5,000,000,000	1 Laporan	5,000,000,000	Biro Humas dan Protokol	Dalam Daerah, Luar Daerah
		4	01	01	1	13	03	3	Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah laporan pengelola dokumentasi pimpinan	250 Media	250 Media	28,641,901,000	250 Media, 8 Edisi, 32 Video	29,000,440,000	1 Laporan	29,500,000,000	1 Laporan	29,500,000,000	Biro Humas dan Protokol	Dalam Daerah, Luar Daerah
		4	01	01	1	14		Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Percentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	6,939,483,000	100%	15,145,320,000	100%	15,650,000,000	100%	37,734,803,000			
		4	01	01	1	14	01	1	Sub Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksana Acara	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksana acara	350 Kali Kegiatan	350 Kali Kegiatan	4,040,000,000	250 Kali Kegiatan, 50 Kali Silaturahmi	9,469,760,000	1 Laporan	9,550,000,000	1 Laporan	9,500,000,000	Biro Humas dan Protokol	Dalam Daerah, Luar Daerah
		4	01	01	1	14	02	2	Sub Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	150 Penerimaan Kunker	150 Penerimaan Kunker	2,245,483,000	150 Penerimaan Kunker	4,973,480,000	1 Laporan	6,000,000,000	1 Laporan	6,000,000,000	Biro Humas dan Protokol	Dalam Daerah, Luar Daerah
		4	01	01	1	14	03	3	Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	85 Orang	85 Orang	654,000,000	85 Orang	702,080,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	7,000,000,000	Biro Humas dan Protokol	Dalam Daerah, Luar Daerah

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

**I**ndikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (*outcome*) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (2023) dapat dicapai.

Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, indikator kinerja daerah dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dari ketiga aspek tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan fokus pada pelaksanaan indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi Penunjang urusan pemerintahan. Penunjang urusan Pemerintahan dimaksud terdiri atas penelitian dan pengembangan. Adapun capaian dari setiap indikator tersebut dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi kinerja Awal Periode RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	<b>Pelayan Umum</b>													
	<b>Penunjang Urusan Pemerintah</b>													
1	Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	22	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)	-	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)						
2	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	45%	50%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP A (Skor) Komponen Pelaporan (12)	A	A	A	12	11,46	12	12	12	12	13	13	13	13
4.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dicapai	100%	100%	98,14%	100%	99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	0%	BB	B	BB	B	BB	BB						
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,32	B	B	B	A	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%
7.	Persentase Penyerapan Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan sesuai Rencana dan Target	82,77	100%	98,99%	100%	98,99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan	96,25%	100%	65,38%	100%	110,20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pengadaan (ULP)												
<b>9.</b>	Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	91,18%	<b>100%</b>	79,37%	<b>100%</b>	79,37%	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%
<b>10.</b>	Jumlah Pemekaran kecamatan yang Difasilitasi	100%	2	-	2	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%
<b>11.</b>	Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang	45%	60	10	60	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>12</b>	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BU MN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.	0	30	35	30	35	80%	80%	85%	85%	90%	90%	
<b>13.</b>	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	0%	100%	!00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>15.</b>	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi Kepada PAD	<b>70%</b>	80%	100	98%	98%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%
	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>						-		-		-	-	
	Persentase kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%
18	Meningkatnya Peringkat MTQ	21 Besar	-	20 Besar	-	15 Besar	-	-	15 Besar	-	-	-	15 Besar
19	Meningkatnya Peringkat STQ	-	20 Besar	-	15 Besar	-	15 Besar	-	-	-	!5 Besar	-	!5 Besar
20	Persentase PD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

21	Persentase PD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	50%	50%	50%	100%	60%	100%	100%	80%	80%	90%	90%	100%
22	Nilai SPM Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Prov. Sumsel. (85%)	97%	97%	97%	100%	97%	100%	100%	97%	97%	97%	97%	97%
24	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	91,32%	91,32%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah Dokumen Perencanaan Bidang/Urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Provinsi Sumatera Selatan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Selatan.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaranp Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Semoga Allah SWT meridhoi semua niat baik kita, sehingga semua program kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ditetapkan dan semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua.

Akhir kata selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan berserta tim penyusun, mohon kritik dan saran dalam rangka mempermudah dan mempercepat pencapaian Visi dan Misi Pembangunan kepala Daerah terpilih periode Tahun 2019 - 2023 dimaksud.

Palembang, 2022

a.n. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
Pj. **SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. S.A. SUPRIONO**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.196406071990031007